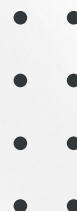




# LAPORAN KINERJA 2023

KANWIL DJKN KALIMANTAN  
SELATAN DAN TENGAH





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segenap Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat mengemban tugas dengan penuh tanggung jawab serta dapat meraih target yang telah ditetapkan dengan baik. Cerminan dari rasa syukur ini terlihat dalam aktivitas kerja di lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah yaitu bekerja dengan semangat, memberikan yang terbaik, dan hasil kinerja yang membanggakan.

Kebijakan efisiensi anggaran sebagai dampak Pandemi Covid-19 dan kebijakan baru terkait addendum kontrak kinerja yang berdampak pada cara bekerja untuk mencapai target yang dibebankan pada jajaran Kanwil DJKN Kalimantan Selatan Dan Tengah. Pegawai dituntut dapat bekerja secara daring dengan target yang semakin besar dan menantang. Pencapaian Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah adalah Nilai Kinerja Organisasi sebesar **116,93** pada tahun 2023 dengan predikat ISTIMEWA yang merupakan NKO tertinggi Tingkat Eselon II pada lingkup DJKN dan pencapaian Manajemen Risiko Organisasi Terbaik II pada tahun 2023 dengan nilai sebesar **99,50**, hal tersebut merupakan bukti serius Pimpinan beserta seluruh jajaran Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dalam meningkatkan kualitas kinerja serta memahami dalam penerapan manajemen risiko yang merupakan salah satu instrument manajemen risiko terutama terkait korupsi adalah melakukan penilaian risiko terhadap korupsi yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengantisipasi dan menetapkan cara menangani risiko korupsi secara efektif dan efisien. Selain itu, terdapat beberapa prestasi yang cukup membanggakan yaitu berhasil mendapatkan Juara 1 Kantor Wilayah Terbaik dalam Lomba Implementasi Budaya Kerja Kolaborasi Digital Kemenkeu serta Juara II Kompetisi Inovasi Kekayaan Negara (KIKN) Tahun 2023 Klaster Inovasi Kantor Vertikal (Alabio KST) dan membuat inovasi berupa SI BEKANTAN KANWIL KST yang merupakan wujud peningkatan pelayanan dari Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah sebagai alat bantu sistem monev yang memudahkan dalam monitoring dan evaluasi sasaran strategis dan mendapatkan informasi terkait capaian kinerja secara cepat dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan pada wilayah kerja Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah meliputi Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (KPKNL Banjarmasin, KPKNL Palangka Raya dan KPKNL Pangkalan Bun). Aplikasi





ini dikembangkan berbasis web sehingga dapat diakses menggunakan browser melalui alamat <https://sites.google.com/view/si-bekantan>, sedangkan untuk ALABIO KST sudah hosting di website Kementerian Keuangan melalui **alabio.kemenkeu.go.id**.

Harapan di tahun 2024, kinerja yang sudah baik dapat dipertahankan serta ditingkatkan lebih baik lagi dengan perencanaan dan implementasi yang tepat serta money yang terukur. Dengan tatanan normal baru, diharapkan dapat merubah *mindset* pegawai dalam bekerja dan meningkatkan kinerjanya serta menghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat kepada organisasi secara luas.

Banjarbaru, Februari 2024  
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik  
Kusumawardhani



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	1
<b>DAFTAR ISI</b>	3
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	4
A. Latar Belakang	5
B. Tugas dan Fungsi	5
C. Aspek Strategis	7
D. Struktur Organisasi	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	14
A. Rencana Strategis	14
B. Matriks Kinerja dan Pendanaan Tahun 2021-2024	17
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	19
A. Capaian Kinerja Organisasi 2023	19
1) Nilai Kinerja Organisasi Per Triwulan IV Tahun 2023	19
2) Evaluasi dan Analisis Kinerja	31
1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	31
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	36
3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	38
4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	38
5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	42
6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	44
7. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan negara yang Efektif	46
8. Penguatan Pengelolaan Keuangan yang optimal	47
9. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	50
B. Realisasi Anggaran	50
C. Inovasi	55
D. Prestasi dan Penghargaan	58
<b>BAB IV PENUTUP</b>	64



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, agar lebih efektif dan efisien maka dibentuk unit-unit vertikal DJKN di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai dengan PMK Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah memiliki wilayah kerja mencakup 3 KPKNL yaitu KPKNL Palangkaraya, KPKNL Pangkalan Bun, dan KPKNL Banjarmasin. Sebagai instansi pemerintah, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Asas akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



## **B. Tugas dan Fungsi**

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Untuk mendukung tugas tersebut, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah menjalankan fungsi. Tugas dan Fungsi dari Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
2. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
3. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penatausahaan, pengalihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
4. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
5. Pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang.
6. Pemberian pelayanan advokasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
7. Pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
8. Pembinaan terhadap Penilai, Jasa Lelang, dan Profesi Lelang;
9. Penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa;
10. Pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian, dan lelang;
11. Pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
12. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, memiliki tugas sebagai berikut :

### **1. Bagian Umum**

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pemantauan program pemangku jabatan fungsional, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, analisis



beban kerja, keuangan, perlengkapan, protokol, tata usaha, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan area pelayanan terpadu di lingkungan Kantor Wilayah.

2. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, pembinaan, penatausahaan dan akuntansi, di bidang kekayaan negara, serta mengoordinasikan penatausahaan barang milik negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah.

3. Bidang Piutang Negara

Bidang Piutang Negara mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, koordinasi, dan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, serta penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.

4. Bidang Penilaian

Bidang Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian, penyusunan basis data penilaian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan penilaian.

5. Bidang Lelang

Bidang Lelang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalan potensi, dan pengembangan lelang serta verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang, pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang, dan bimbingan terhadap Profesi Lelang dan Jasa Lelang.

6. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi

Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penyiapan bahan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja, melaksanakan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, melaksanakan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum, serta melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi dan hubungan masyarakat.



### **C. Aspek Strategis**

Terdapat empat peran strategis DJKN yaitu:

1. Pengemban amanat UUD 1945.
  2. Kontributor perekonomian nasional.
  3. Aktor penting Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
  4. *Emerging Organization*.
- 
- 1) Sebagai pengemban amanat UUD 1945, DJKN menjalankan amanat pada pasal 33 ayat 2 dimana Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan cara meningkatkan fungsinya sebagai koordinator kekayaan negara. Agar fungsinya selaku koordinator berjalan baik maka DJKN mencanangkan enam langkah inisiatif manajemen aset:
    - Inventarisasi dan penilaian Sumber Daya Alam.
    - Digitalisasi pengelolaan aset.
    - Regulasi optimalisasi aset Kementerian dan Lembaga.
    - Optimalisasi aset BUN.
    - Memaksimalkan pemanfaatan dan Return On Asset.
    - Kajian portofolio aset setiap tahun.
  - 2) Selaku kontributor perekonomian nasional, posisi strategis DJKN adalah:
    - Menjaga keberlangsungan BUMN "*Guardian BUMN*"
    - Penghasil alternatif PNBP.
    - Pengaman APBN dalam hal pengendali belanja negara.
    - Pengelola misi khusus "*Special mission*" yaitu misi pembangunan yang cakupannya diluar perhal keuangan secara umum, dimana DJKN sebagai pemegang manajemen kendali.
  - 3) Sebagai aktor penting LKPP, fungsi strategis DJKN adalah mengelola aset sebagai pos terbesar neraca. Aset yang dikelola berupa aset BUN seperti aset properti eks BPPN, properti eks PT PPA (Persero), aset KKKS, Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMAT), aset yang berasal dari APBN, aset yang timbul karena perjanjian lainnya.
  - 4) Fungsi strategis DJKN yang keempat adalah *emerging organization*, yaitu organisasi dengan proses bisnis modern dan organisasi dengan *multi task* yang menjalankan fungsi pengelolaan kekayaan negara, lelang, penilaian, dan pengurusan piutang negara.



## D. Struktur Organisasi



Keterangan:

Tahun Anggaran 2023 (sampai dengan Desember 2023):

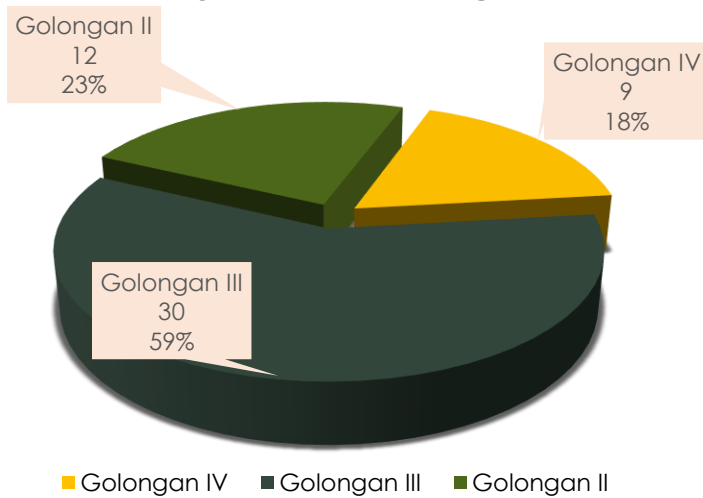
1. Plt. Kabid Piutang Negara diemban oleh Kepala Seksi Piutang Negara II



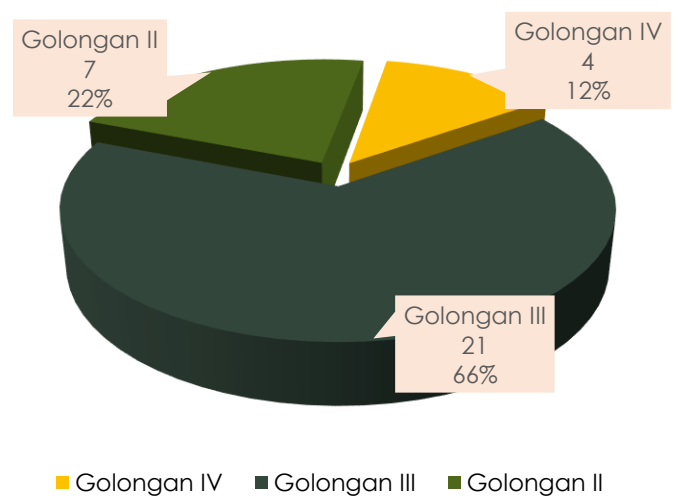
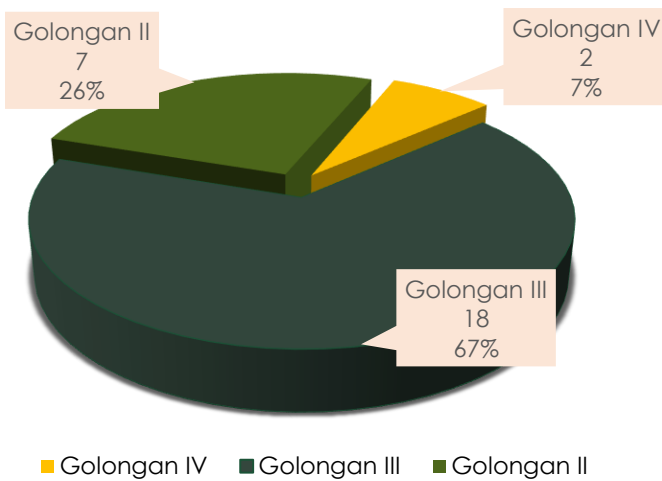
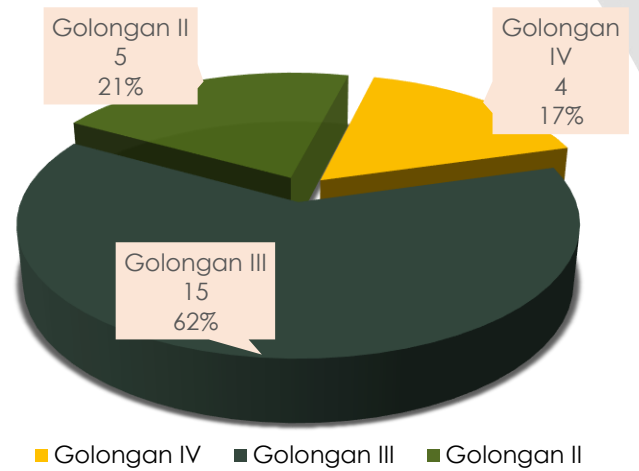
## 1) Matriks Pegawai

### 1. Golongan Kepangkatan

KANWIL DJKN KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH



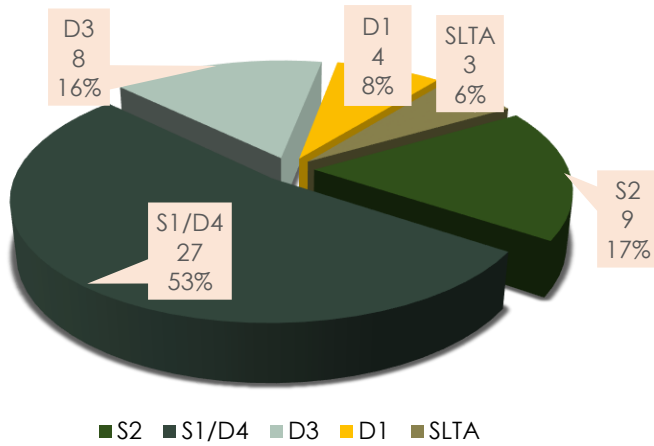
KPKNL PALANGKARAYA



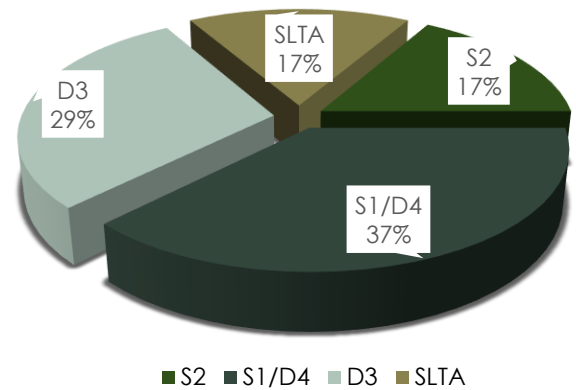


## 2. Pendidikan

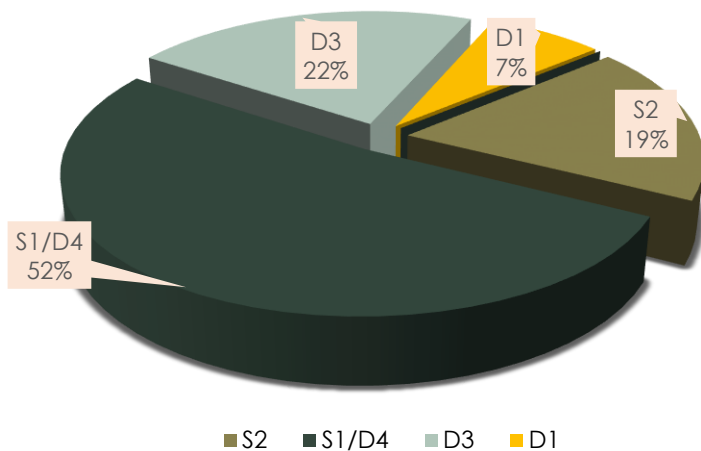
### KANWIL DJKN KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH



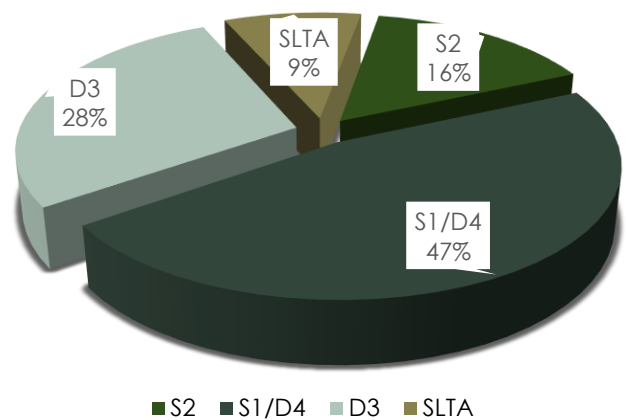
### KPKNL PALANGKARAYA



### KPKNL PANGKALAN BUN



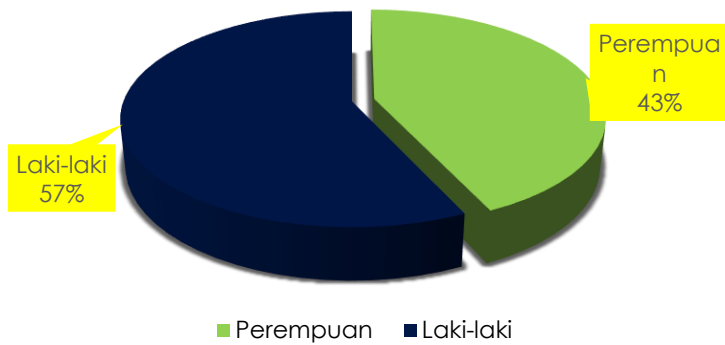
### KPKNL BANJARMASIN



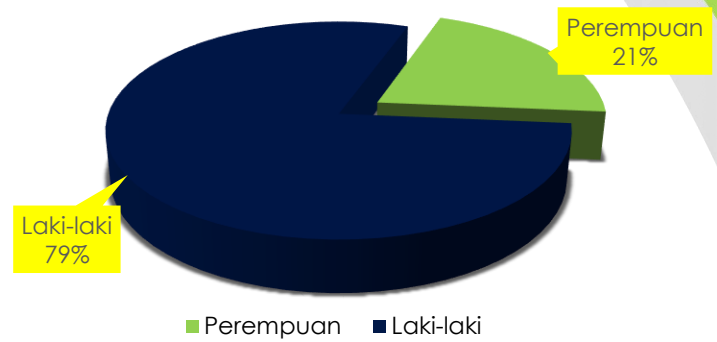


### 3. Jenis Kelamin

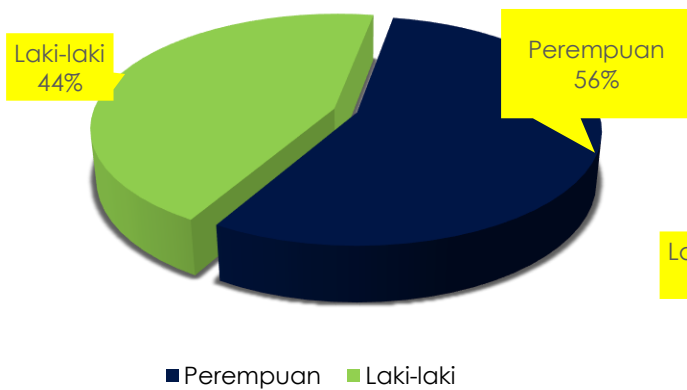
KANWIL DJKN KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH



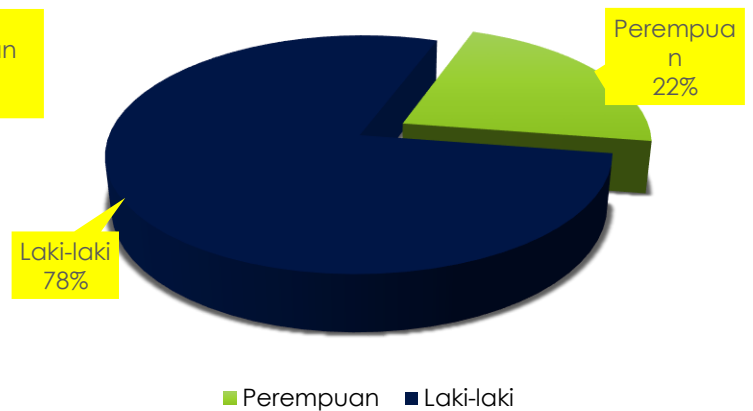
KPKNL PALANGKARAYA



KPKNL PANGKALAN BUN



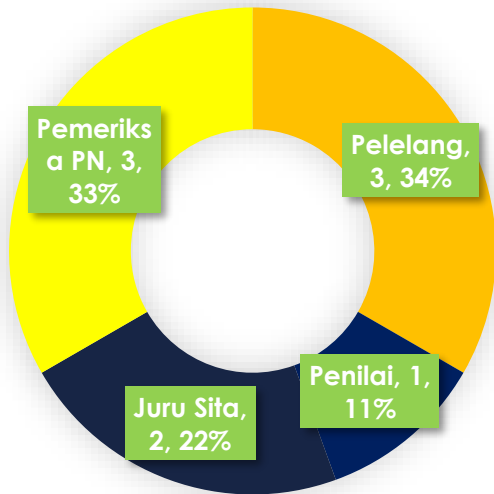
KPKNL BANJARMASIN





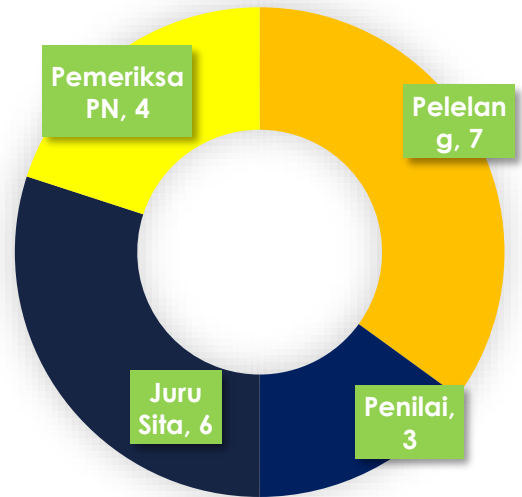
4. Jabatan Fungsional

KANWIL DJKN KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH



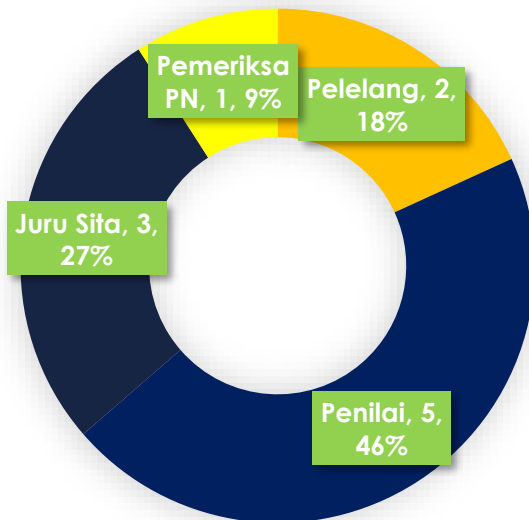
■ Pelelang ■ Penilai ■ Juru Sita ■ Pemeriksa PN

KPKNL PALANGKARAYA



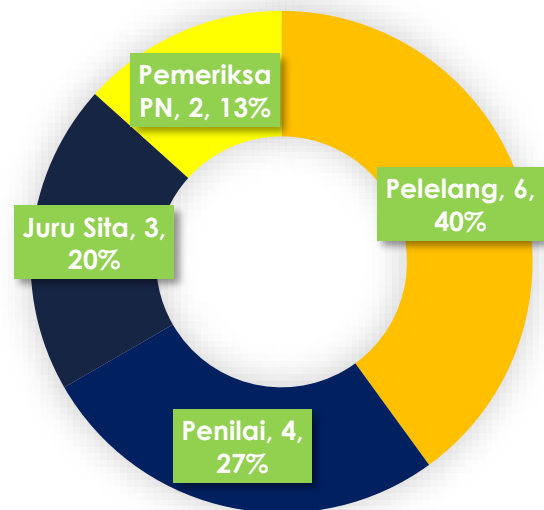
■ Pelelang ■ Penilai ■ Juru Sita ■ Pemeriksa PN

KPKNL PANGKALAN BUN



■ Pelelang ■ Penilai ■ Juru Sita ■ Pemeriksa PN

KPKNL BANJARMASIN



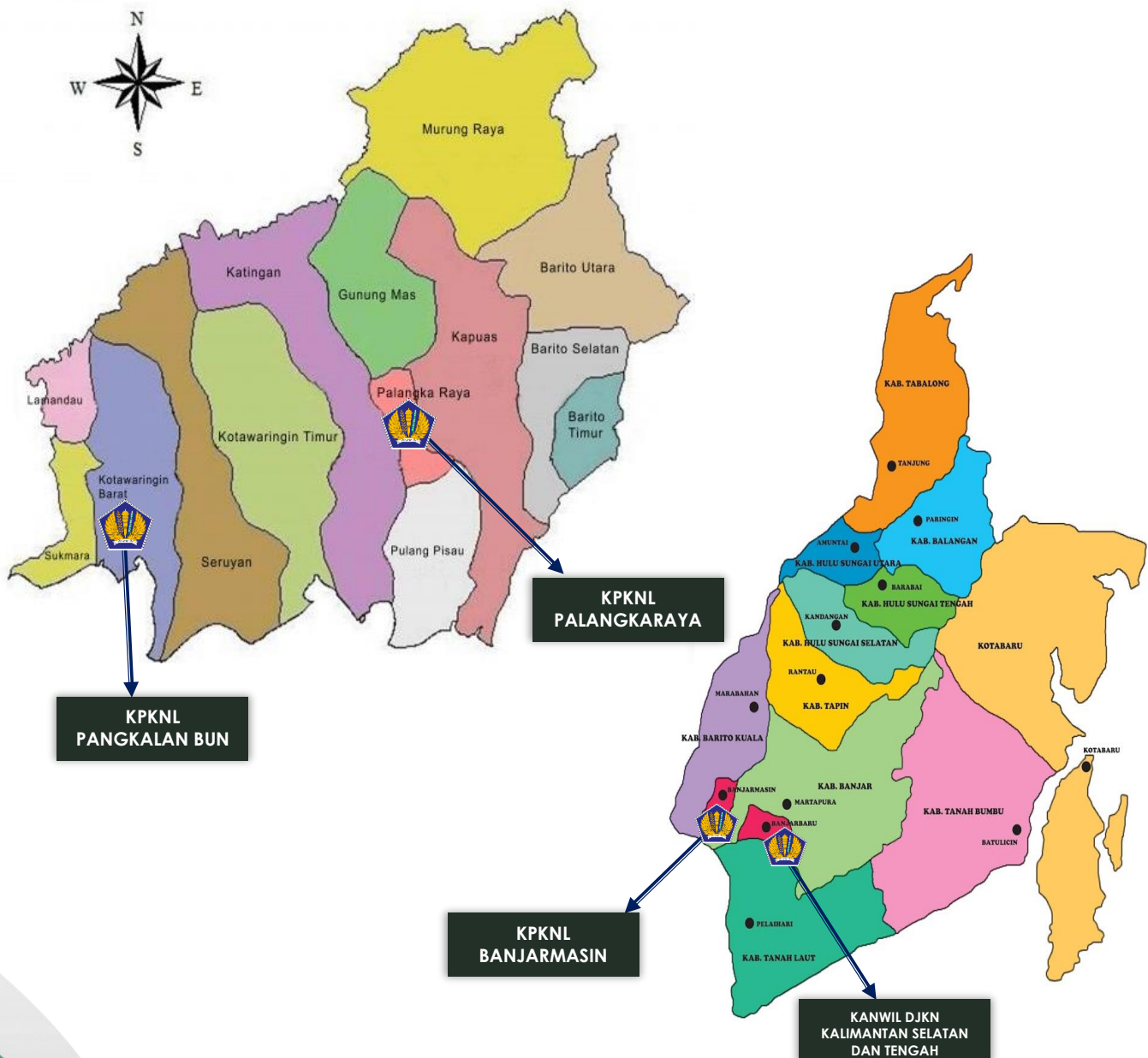
■ Pelelang ■ Penilai ■ Juru Sita ■ Pemeriksa PN



## 2) Wilayah Kerja

Kanwil DJKN Kalimantan Tengah dan Selatan membawahi :

1. KPKNL Palangkaraya (9 Kabupaten/Kota)
2. KPKNL Pangkalan Bun (5 Kabupaten/Kota)
3. KPKNL Banjarmasin (seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan)





## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	UIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial							
	Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	55%	57%	60%	65%	70%	Dit. BMN
		Implementasi evaluasi kinerja BMN berupa tanah dan bangunan	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. BMN
		Persentase bidang tanah yang disertipikatkan	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. BMN (Lead)
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. BMN (Lead)
		Indeks implementasi pengasuransian BMN	50 (Skala 100)	55 (Skala 100)	60 (Skala 100)	65 (Skala 100)	70 (Skala 100)	Dit. BMN
		Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	100%	100%	100%	100%	100%	Dit PNKNL
		Indeks efektivitas penyelesaian peraturan	70 (Skala 100)	70 (Skala 100)	70 (Skala 100)	70 (Skala 100)	70 (Skala 100)	Dit Huhu (Lead)



No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Tingkat akurasi data piutang negara	-	-	50%	100%	-	Dit. PNKNL
	Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya	Indeks efektivitas investasi pemerintah	4 (Skala 5)	4 (Skala 5)	4 (Skala 5)	4 (Skala 5)	4 (Skala 5)	Dit. KND
2.	Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya							
	Pengelolaan lelang yang optimal	Persentase pencapaian hasil lelang (pokok lelang)	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. Lelang
		Persentase produktivitas lelang	32%	34%	34%	34%	34%	Dit. Lelang
3.	Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien							
	Penilaian yang berkualitas	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	30%	29%	28%	27%	26%	Dit. Penilaian
		Pemenuhan Target Pengembangan Profesional Berkelanjutan (CPD) Penilai Pemerintah	-	100%	100%	100%	100%	Dit. Penilaian
4.	Birokrasi dan layanan publik DJKN yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien							
	Organisasi dan SDM yang optimal	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,00 (Skala 5)	4,05 (Skala 5)	4,10 (Skala 5)	4,15 (Skala 5)	4,20 (Skala 5)	Setditjen (Lead)
		Persentase penyelesaian <i>delayering</i>	100%	100%	100%	-	-	Setditjen
		Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	75%	77%	80%	82%	85%	Setditjen
		Persentase Pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya	87,83 %	87,83 %	87,83 %	87,83 %	87,83 %	Setditjen
		Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	95%	95%	95%	95%	Setditjen (Lead)



Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	Dit. PKNSI
	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	85%	87%	90%	92%	95%	Dit. PKNSI
Pengendalian dan Pengawasan Internal yang bernilai tambah	Indeks integritas	90 (skala 100)	90,5 (skala 100)	91 (skala 100)	91,5 (skala 100)	92 (skala 100)	Setditjen
	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang ditindaklanjuti	89%	89,5%	89,5 %	90%	90%	Setditjen (Lead)
	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	70%	75%	75%	80%	80%	Dit. BMN (Lead)
Komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas komunikasi publik	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	Dit. Huhu



## B. Matriks Kinerja dan Pendanaan Tahun 2021-2024

Nomenklatur	Uraian	Target				Indikasi Pendanaan (Rp juta)				UIC
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA										
<b>PROGRAM</b>	<b>PENGLOLAAN PERBENDAHARAAN, KEKAYAAN NEGARA, DAN RISIKO</b>					109.508,038	122.897,695	125.237,308	127.625,089	DJKN
<b>Sasaran Program 2</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial</b>									
<b>Indikator Program</b>	<i>Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK)</i>	57%	60%	65%	70%					
<b>Kegiatan 1</b>	<b>Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko</b>					10.623,490	10.765,844	10.910,107	11.056,302	
<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Kebijakan dan Keputusan Administratif di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko yang kredibel</b>									
<b>Indikator Sasaran Kegiatan</b>	<i>Indeks efektivitas kebijakan</i>	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)					
<b>Kegiatan 2</b>	<b>Komunikasi, Edukasi, dan Standarisasi Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko</b>					6.305,885	6.390,383	6.476,015	6.562,793	
<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Persepsi Positif Publik dan Standarisasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko</b>									

Nomenklatur	Uraian	Target				Indikasi Pendanaan (Rp juta)				UIC
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Indikator Sasaran Kegiatan</b>	<i>Indeks efektivitas komunikasi publik</i>	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)					
<b>Kegiatan 3</b>	<b>Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara</b>					1.735,365	1.758,618	1.782,184	1.806,065	
<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Pengelolaan Kas Negara yang Prudent dan Optimal</b>									
<b>Indikator Sasaran Kegiatan</b>	<i>Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat</i>	4,50%	4,50%	4,25%	4,25%					
<b>Kegiatan 5</b>	<b>Pengelolaan Aset</b>					90.141,028	103.271,168	105.347,785	107.469,046	
<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Pengelolaan aset yang Profesional, Tertib, Optimal serta Akuntabel</b>									
<b>Indikator Sasaran Kegiatan</b>	<i>a. Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah</i>	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)					
<b>Indikator Sasaran Kegiatan</b>	<i>b. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN</i>	100%	100%	100%	100%					
<b>Kegiatan 6</b>	<b>Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara</b>					354,995	359,751	364,572	369,457	
<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan dan Tepat Waktu</b>									
<b>Indikator Sasaran Kegiatan</b>	<i>Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti</i>	89,5%	89,5%	90%	90%					
<b>Kegiatan 7</b>	<b>Movev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko</b>					347,274	351,928	356,644	361,423	
<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan yang Kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko</b>									



**LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah

Nomenklatur	Uraian	Target				Indikasi Pendanaan (Rp juta)				UIC
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Indikator Sasaran Kegiatan	Persentase tindak lanjut pengelolaan aset	75%	75%	80%	80%					
<b>PROGRAM</b>	<b>DUKUNGAN MANAJEMEN</b>					<b>745.722,618</b>	<b>745.830,973</b>	<b>757.231,895</b>	<b>768.830,822</b>	
Sasaran Program 1	Organisasi dan SDM yang Optimal									
Indikator Kinerja Program 1	a. Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan	4,05 (skala 5)	4,1 (skala 5)	4,15 (skala 5)	4,2 (skala 5)					
	b. Tingkat implementasi learning organization	77%	80%	82%	85%					
Sasaran Program 2	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi									
Indikator Kinerja Program 2	a. Tingkat downtime sistem TIK	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%					
	b. Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	87%	90%	92%	95%					
Sasaran Program 3	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah									
Indikator Kinerja Program 3	Indeks integritas	90,5 (skala 100)	91 (skala 100)	91,5 (skala 100)	92 (skala 100)					
Kegiatan 1	Pengelolaan Organisasi dan SDM					388.722,817	396.880,243	403.498,344	410.244,768	
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi									
Indikator Sasaran Kegiatan	a. Persentase penyelesaian delayering	100%	100%	-	-					
Nomenklatur	Uraian	Target				Indikasi Pendanaan (Rp juta)				UIC
(1)	(2)	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	(11)
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Kegiatan 2	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum					332.030,434	323.452,317	327.880,669	332.375,220	
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel									
Indikator Sasaran Kegiatan	a. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu	95%	95%	95%	95%					
	b. Tingkat kualitas pengelolaan BMN	80%	80%	80%	80%					
Kegiatan 3	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi					17.217,010	17.552,265	17.794,580	18.038,994	
Sasaran Kegiatan	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal									
Indikator Sasaran Kegiatan	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	87%	90%	92%	95%					
Kegiatan 4	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik					1.934,494	1.960,416	1.986,685	2.013,307	
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan									
Indikator Sasaran Kegiatan	Indeks efektivitas komunikasi publik	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)					
Kegiatan 5	Legislasi dan Litigasi					3.416,370	3.462,149	3.508,542	3.555,556	
Sasaran Kegiatan	Legislasi dan Litigasi yang Optimal									
Indikator Sasaran Kegiatan	Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi	72,5	75	77,5	80					
Kegiatan 6	Pengendalian dan Pengawasan Internal					2.401,492	2.523,581	2.563,074	2.602,975	
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif									



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi 2023

#### 1) Nilai Kinerja Organisasi Per Triwulan IV Tahun 2023

Kode	IKU	V/C	Target Desember	Target Q4	Target 2023	Realisasi s.d. Desember	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas Desember	IndeksTanpa Batas Q4	Indeks Max. Desember	Indeks Max. Q4	Indeks Max. 2023	Keterangan
	<i>Stakeholder Perspective(30%)</i>	30%									34.06%	34.06%	34.06%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan										113.52%	113.52%	113.52%	
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	100%	100%	160.18%	14%	33%	160.18%	160.18%	120.00%	120.00%	120.00%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80%	80%	80%	136.37%	14%	33%	170.46%	170.46%	120.00%	120.00%	120.00%	hijau
1c-CP	Indeks Integritas	P/M	88.67	88.67	88.67	89.17	14%	33%	100.56%	100.56%	100.56%	100.56%	100.56%	hijau
	<i>Customer Perspective(20%)</i>	20%									23.46%	23.46%	23.46%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa										117.29%	117.29%	117.29%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	100%	100%	121.44%	14%	50%	121.44%	121.44%	120.00%	120.00%	120.00%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	100%	100%	114.59%	14%	50%	114.59%	114.59%	114.59%	114.59%	114.59%	hijau
	<i>Internal Process Perspective (25%)</i>	25%									29.85%	29.85%	29.85%	
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal										119.40%	119.40%	119.40%	
3a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	68%	68%	68%	80.49%	19%	37%	118.37%	118.37%	118.37%	118.37%	118.37%	hijau
3b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan (Sesuai Target Kriteria)	P/L	100%	100%	100%	177.20%	19%	37%	177.20%	177.20%	120.00%	120.00%	120.00%	hijau
3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	100%	100%	122.86%	14%	27%	122.86%	122.86%	120.00%	120.00%	120.00%	hijau
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional										120.00%	120.00%	120.00%	



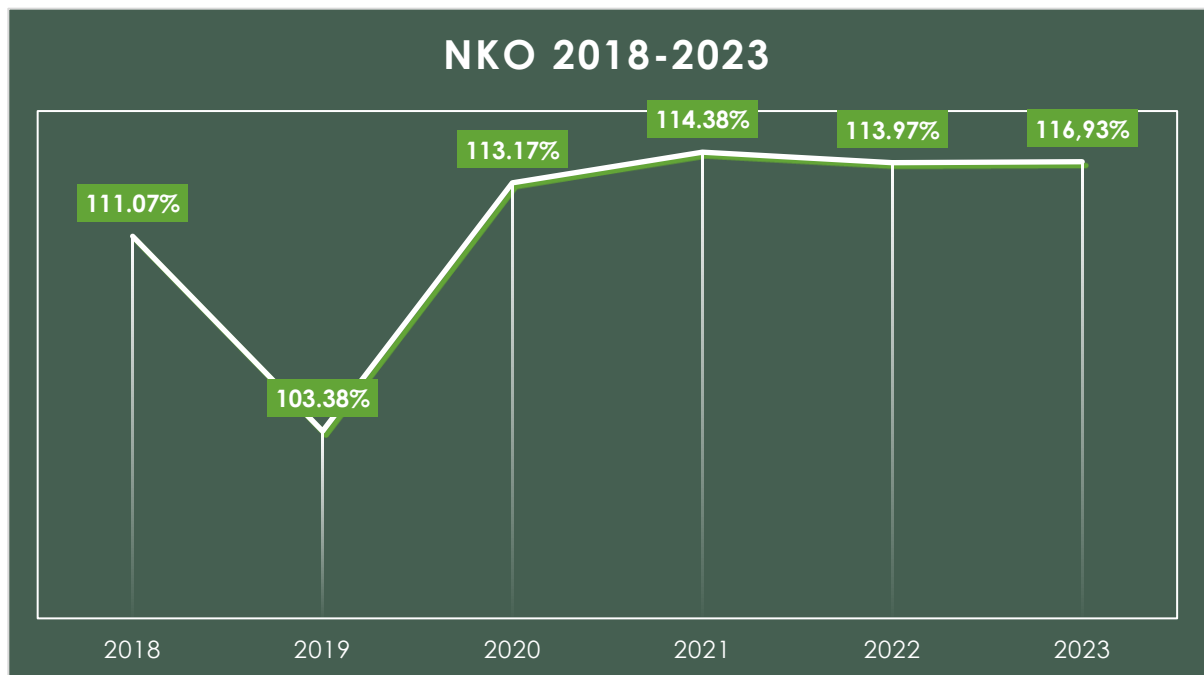
**LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah

4a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	25%	25%	25%	0.63%	14%	40%	197.50%	197.50%	120.00%	120.00%	120.00%	hijau
4b-N	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	E/M	70	70	70	92.88	21%	60%	132.69%	132.69%	120.00%	120.00%	120.00%	hijau
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif										118.14%	118.14%	118.14%	
5a-N	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang online	P/M	86%	86%	86%	100.00%	14%	50%	116.28%	116.28%	116.28%	116.28%	116.28%	hijau
5b-N	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset)	P/M	100%	100%	100%	136.11%	14%	50%	136.11%	136.11%	120.00%	120.00%	120.00%	hijau
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif										120.00%	120.00%	120.00%	
6a-N	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	P/M	86%	86%	86%	97.50%	14%	50%	158.26%	158.26%	120.00%	120.00%	120.00%	hijau
	Learning & Growth Perspective (25%)		25%								29.56%	29.56%	29.56%	
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif										120.00%	120.00%	120.00%	
7a-N	Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu	P/M	100.00	100.00	100.00	142.65	14%	100%	142.65%	142.65%	120.00%	120.00%	120.00%	hijau
7a1-CP	Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	P/M	3.55	3.55	3.55	4.86	14%	50%	137%	137%	120.00%	120.00%	120.00%	hijau
7a2-N	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	P/M	90.00	90.00	90	163.80	14%	50%	182.00%	182.00%	120.00%	120.00%	120.00%	hijau
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal										114.77%	114.77%	114.77%	
8a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100	100	100	109.54	14%	50%	109.54%	109.54%	109.54%	109.54%	109.54%	hijau
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	100%	100%	120%	14%	50%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	hijau
8c-N	Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	P/M	15%	15%	15%	0.00%	14%	11%	200.00%	200.00%	120.00%	120.00%	120.00%	hijau
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif													
9b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	P/M	60	60	60	96.96	14%	11%	200.00%	200.00%	120.00%	120.00%	120.00%	hijau
10	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi										120.00%	120.00%	120.00%	
10a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai (30 JP)	P/M	100%	100%	100%	120.00%	14%	50%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	hijau



10b-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	P/M	80	80	80	98.82	14%	50%	124.00%	124.00%	120.00%	120.00%	120.00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)											116.93%	116.93%	116.93%	hijau

Dalam kurun 5 tahun terakhir (2019-2023) Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mengalami kenaikan secara signifikan dikarenakan adanya penerapan penguatan rencana strategis sudah diterapkan antara lain perbaikan database sehingga keputusan strategis yang diambil tepat sasaran dan penggalian potensi di semua IKU yang ada serta mengoptimalkan SDM dan sumber daya yang ada, pada tahun 2022 NKO dari 113,97% dan terdapat kenaikan pada tahun 2023 NKO menjadi 116,93% hal ini disebabkan perekonomian nasional lebih stabil.





1. IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP Lelang)

Unit	Target dan Realisasi			Indeks Capaian	
	Target		Realisasi s.d. Desember	s.d. Desember	Tahunan
	Tahunan	s.d. Desember (100%)			
Kanwil (PL II)	Rp 1.535.000.000,00	Rp 1.535.000.000,00	Rp 1.106.017.730,00	72,05%	72,05%
KPKNL PKY	Rp 1.075.000.000,00	Rp 1.075.000.000,00	Rp 1.145.718.322,00	106,58%	106,58%
KPKNL PBN	Rp 817.000.000,00	Rp 817.000.000,00	Rp 1.022.885.274,00	125,20%	125,20%
KPKNL BJM	Rp 4.850.000.000,00	Rp 4.850.000.000,00	Rp 7.407.820.843,00	152,20%	152,20%
<b>Total Kanwil</b>	<b>Rp 8.277.000.000,00</b>	<b>Rp 8.277.000.000,00</b>	<b>Rp10.682.442.169,00</b>	<b>129,06%</b>	<b>129,06%</b>

2. Persentase Produktivitas Lelang

Unit	Capaian s.d. Desember		
	Target s.d. Desember	Realisasi	Indeks Capaian Tahunan
Kanwil (PL II)	80%	71,95%	89,93%
KPKNL Palangka Raya	80%	105,00%	131,25%
KPKNL Pangkalan Bun	80%	105,00%	131,25%
KPKNL Banjarmasin	80%	105,00%	131,25%
<b>Total Kanwil</b>	<b>80%</b>	<b>105,00%</b>	<b>131,25%</b>



### 3. Indeks Integritas

Unit	Capaian s.d. Desember		
	Target s.d. Desember	Realisasi	Indeks Capaian Tahunan
Kanwil (Bidang KIHI)	88,67	89,17	100,56%
KPKNL Palangka Raya	88,67	89,17	100,56%
KPKNL Pangkalan Bun	88,67	89,17	100,56%
KPKNL Banjarmasin	88,67	89,17	100,56%
<b>Total Kanwil</b>	<b>88,67</b>	<b>89,17</b>	<b>100,56%</b>

### 3. IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang

Unit	Target dan Realisasi			Indeks Capaian	
	Target		Realisasi s.d. Desember	Desember	Tahunan
	Tahunan	s.d. Desember (100%)			
Kanwil (PL II)	Rp 204.000.000.000,00	Rp 204.000.000.000,00	Rp 184.514.875.000,00	90,36%	90,36%
KPKNL PKY	Rp 28.000.000.000,00	Rp 28.000.000.000,00	Rp 37.594.514.984,00	134,27%	134,27%
KPKNL PBN	Rp 23.400.000.000,00	Rp 23.400.000.000,00	Rp 29.115.628.435,00	124,43%	124,43%
KPKNL BJM	Rp 121.900.000.000,00	Rp 121.900.000.000,00	Rp 207.213.245.198,00	169,99%	169,99%
<b>Total Kanwil</b>	<b>Rp 377.500.000.000,00</b>	<b>Rp 377.500.000.000,00</b>	<b>Rp 458.438.263.617,00</b>	<b>121,44%</b>	<b>121,44%</b>



5. IKU Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara

Unit	Target dan Realisasi			Indeks Capaian	
	Target		Realisasi s.d. Desember	Desember	Tahunan
	Tahunan	s.d. Desember (100%)			
KPKNL PKY	Rp 1.877.756.000,00	Rp 1.877.756.000,00	Rp 2.226.502.928,13	118,57%	118,57%
KPKNL PBN	Rp 4.515.985.234,00	Rp 4.515.985.234,00	Rp 4.664.435.914,20	103,29%	103,29%
KPKNL BJM	Rp 6.200.000.000,00	Rp 4.515.985.234,00	Rp 7.540.116.719,00	121,61%	121,61%
<b>Total Kanwil</b>	<b>Rp 12.593.741.234,00</b>	<b>Rp 12.593.741.234,00</b>	<b>Rp 14.431.055.561,33</b>	<b>114,59%</b>	<b>114,59%</b>

6. IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Unit	Target Tahunan	Target s.d. Desember	Realisasi s.d. Desember			Indeks Capaian	
			Pengukuran	Optimalisasi	Pembobotan (75% Pengukuran + 25% Optimalisasi)	s.d. Desember	Tahunan
Kanwil	68%	68%	60,16%	20,34%	80,49%	118,37%	118,37%
KPKNL PKY	68%	68%	63,37%	18,70%	82,07%	120,69%	120,69%
KPKNL PBN	68%	68%	55,82%	19,23%	75,05%	110,36%	110,36%
KPKNL BJM	68%	68%	60,11%	22,09%	82,19%	120,87%	120,87%

Keterangan :

1. Capaian/Realisasi SBSK dihitung dari komponen **Pengukuran (75%) dan Optimalisasi (25%)**
2. Capaian/Realisasi berdasarkan review Bidang PKN



7. IKU Persentase Bidang Tanah BMN yang DIsertipikatkan

Unit	Target dan Realisasi		Indeks Capaian Tahunan
	Target Tahunan	Realisasi	
KPKNL Palangka Raya	100%	146,77%	146,77%
KPKNL Pangkalan Bun		406,06%	406,06%
KPKNL Banjarmasin		166,85%	166,85%
<b>Total Kanwil</b>	<b>100%</b>	<b>177,20%</b>	<b>177,20%</b>

8. IKU Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

Unit	Target dan Realisasi			Indeks Capaian	
	Target		Realisasi s.d. Desember	Desember	Tahunan
	Tahunan	s.d. Desember (100,00%)			
KPKNL Palangka Raya	11	11	14	127,27%	127,27%
KPKNL Pangkalan Bun	7	7	9	128,57%	128,57%
KPKNL Banjarmasin	52	52	63	121,15%	121,15%
<b>Total Kanwil</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>86</b>	<b>122,86%</b>	<b>122,86%</b>

9. IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Unit	Target dan Realisasi		Indeks Capaian	
	Target 2023	Realisasi s.d. Desember	Desember	Tahunan
Kanwil (Bid, Penilaian)	25%	0,22%	199,12%	199,12%
KPKNL Palangka Raya		0,17%	199,34%	199,34%
KPKNL Pangkalan Bun		0,00%	200,00%	200,00%
KPKNL Banjarmasin		2,11%	200,00%	200,00%
<b>Total Kanwil (Rata-rata Kanwil dan KPKNL)</b>		<b>0,62%</b>	<b>197,50%</b>	<b>197,50%</b>



10. IKU Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien

Unit	Target dan Realisasi		Indeks Capaian	
	Target 2023	Realisasi s.d. Desember	Desember	Tahunan
Kanwil (Bid, Penilaian)	70	92,88	120,00%	120,00%
KPKNL Palangka Raya	70	90,95	129,93%	129,93%
KPKNL Pangkalan Bun	70	96,88	138,39%	138,39%
KPKNL Banjarmasin	70	90,81	129,73%	129,73%
<b>Total Kanwil</b>	<b>70</b>	<b>92,88</b>	<b>132,68%</b>	<b>132,68%</b>

11. IKU Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang online

Unit	Target 2023	Target dan Realisasi		Indeks Capaian	
		Jumlah Pemohon Lelang	Realisasi s.d.	Desember	Tahunan
KPKNL Palangka Raya	86%	352	100%	116,28%	116,28%
KPKNL Pangkalan Bun	86%	261	100%	116,28%	116,28%
KPKNL Banjarmasin	86%	1.838	100%	116,28%	116,28%
<b>Total Kanwil</b>	<b>86%</b>	<b>2.451</b>	<b>100%</b>	<b>116,28%</b>	<b>116,28%</b>

12. IKU Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

Unit	Target dan Realisasi		Indeks Capaian	
	Target	Realisasi	Desember	Tahunan
	Total	Total		
KPKNL Palangka Raya	57	74	135,49%	135,49%
KPKNL Pangkalan Bun	68	98	148,17%	148,17%
KPKNL Banjarmasin	169	204	126,29%	126,29%
<b>Total Kanwil</b>	<b>294</b>	<b>376</b>	<b>136,11%</b>	<b>136,11%</b>



**Keterangan :**

**Target IKU = Target Progres Evaluasi Kinerja + Target Progres Penyampaian Rekomendasi**

(Realisasi Evaluasi Kinerja 2020 + Realisasi Evaluasi Kinerja 2021 + Target Evaluasi Kinerja 2022)

$$\text{Realisasi IKU} = \left[ \frac{\text{Jumlah realisasi evaluasi kinerja}}{\text{Jumlah target evaluasi kinerja}} \times 50\% \right] + \left[ \frac{\text{Jumlah realisasi penyampaian rekomendasi}}{\text{Jumlah target penyampaian rekomendasi}} \times 50\% \right]$$

13. IKU Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara

Unit	Target dan Realisasi		Indeks Capaian	
	Target	Realisasi		
	Total	Total	Desember	Tahunan
Kanwil	86%	97%	120%	120%

14. IKU Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu

Target	Target dan Realisasi		Indeks Capaian Desember
	Target	Realisasi	
Kanwil	100	142,65	120

15. IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA)

Unit	Target dan Realisasi			Indeks Capaian
	Target 2023	Target Desember	Realisasi Desember	
KANWIL	100%	100%	109,52%	109,52%
KPKNL Palangka Raya	100%	100%	120,00%	120,00%
KPKNL Pangkalan Bun	100%	100%	101,12%	101,12%
KPKNL Banjarmasin	100%	100%	106,64%	106,64%



16. IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Target	Target dan Realisasi		Indeks Capaian Desember
	Target	Realisasi	
Kanwil	100%	120%	120%

17. IKU Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

Unit	Target dan Realisasi			Indeks Capaian
	Target 2023	Target Desember	Realisasi Desember	
KANWIL	15,00%	15,00%	0,00%	200,00%
KPKNL Palangka Raya	15,00%	15,00%	0,00%	200,00%
KPKNL Pangkalan Bun	15,00%	15,00%	0,00%	200,00%
KPKNL Banjarmasin	15,00%	15,00%	0,00%	200,00%

18. IKU Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif

Target	Target dan Realisasi		Indeks Capaian Desember
	Target	Realisasi	
Kanwil	60	96	120%



19. IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai (30 JP)

Unit	Target dan Realisasi						Capaian IKU (Capaian Utama + Capaian Tambahan)	Indeks Capaian s.d. Des
	Target s.d. Des	Jumlah Total Pegawai	Jumlah Pegawai Memenuhi 24 JP dan Memenuhi Usulan DKI (Desember 2023)	Jumlah Pegawai Memenuhi 24 JP dan telah melebihi kriteria	Capaian			
					Utama	Tambahan		
Kanwil	100,00%	47	47	47	100,00%	20,00%	120,00%	120,00%
KPKNL PKY	100,00%	23	23	23	100,00%	20,00%	120,00%	120,00%
KPKNL PBN	100,00%	25	25	25	100,00%	20,00%	120,00%	120,00%
KPKNL BJM	100,00%	32	32	32	100,00%	20,00%	120,00%	120,00%

20. Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

Target	Target dan Realisasi		Indeks Capaian Desember
	Target	Realisasi	
Kanwil	80	98,82	123,53%
KPKNL Palangkaraya (Seksi KI)	80	93,43	116,79%
KPKNL Palangkaraya (Subbag Umum)	80	93,20	116,50%
Total KPKNL Palangkaraya	80	93,32%	116,64%



Target	Target dan Realisasi		Indeks Capaian Desember
	Target	Realisasi	
KPKNL Pangkalan Bun (Seksi KI)	80	98,82	123,53%
KPKNL Pangkalan Bun (Subbag Umum)	80	92,68	115,85%
Total KPKNL Pangkalan Bun	80	95,75	119,69%
KPKNL Banjarmasin (Seksi KI)	80	89,852	112,31%
KPKNL Banjarmasin (Subbag Umum)	80	94,27	117,84%
Total KPKNL Banjarmasin	80	92,06	115,08%



## Evaluasi dan Analisis Kinerja

### 1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan

#### Dalam Roadmap DJKN TA 2019-2028:

Distinguished Asset Manager menetapkan komitmen besar untuk mewujudkan kekayaan negara yang dikelola secara optimal, berkelanjutan, instrumental dalam keuangan negara dan contributif dalam perekonomian nasional. Dalam rangka menjaga komitmen besar tersebut, diperlukan langkah yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif Bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mengelola aset negara. Untuk itu DJKN mengadakan Kompetisi Inovasi Manajer Aset DJKN (KOIN MAS DJKN)

#### Kendala/Akar Masalah

Barang Milik Negara yang terindikasi idle maupun belum teroptimalisasi dengan baik

#### Output

Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat

1. Daftar Aset yang akan dimanfaatkan
2. Laporan kegiatan Monitoring
3. Laporan Hasil Evaluasi kegiatan

#### Rekomendasi Rencana Aksi

Koordinasi dan pendampingan terkait rencana optimalisasi Barang Milik Negara (BMN) yang dijadikan objek KOIN MAS

### A) Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Bidang PKN	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan							
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	SM. I	Q3	s.d. Q3	s.d. Desember	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	10%	30%	60%	60%				
Realisasi	Rp 7.986.438.620	RpRp17,327,938,945	Rp25.485.605.819,00	Rp25.485.605.819,00	Rp38.895.778.040,00			
Capaian	39,93%	86,64%	141,59%	141,59%	152,53%			



**Isu Utama :**

1. Kesadaran dari Satuan Kerja dalam mengoptimalkan pemanfaatan BMN masih kurang.
2. Minat pelaku usaha untuk memanfaatkan BMN dalam usaha bisnisnya belum optimal.

**Implikasi :**

Dengan kurangnya kesadaran Satuan Kerja dan juga minat dari pelaku usaha dalam pemanfaatan BMN mengakibatkan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pemanfaatan BMN belum sepenuhnya optimal. Padahal jika BMN dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien, dapat membantu mengembangkan perekonomian bagi pelaku usaha maupun negara.

**Akar masalah**

KPKNL di unit Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah berada di wilayah kabupaten dimana Satuan Kerjanya relatif tidak memiliki BMN yang potensial untuk dapat dilakukan pemanfaatan.

**Tindakan yang akan dilaksanakan :**

Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pada Pengelolaan Kekayaan Negara secara bulanan (ND-295/WKN.12/2023, ND-421/WKN.12/2023, ND-544/WKN.12/2023, ND-650/WKN.12/2023, ND-763/WKN.12/2023, dan ND-885/WKN.12/2023, ND-1081/WKN.12/2023, ND-1183/WKN.12/2023, ND-1339/WKN.12/2023, ND-1505/WKN.12/2023, ND-1626/WKN.12/ 2023).

**Rekomendasi Rencana Aksi**

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur setiap bulan untuk memantau perkembangan capaian.
2. Melakukan koordinasi dengan Korwil di lingkungan Kalimantan Selatan dan Tengah.

**B) Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP Piutang Negara)**

Nama Unit	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan							
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP Piutang Negara)							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	PoI/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	MAK/TL K
Realisasi	22,79%	95,61%	95,61%	148,16%	148,16%	166,08%	166,08%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	



**Isu Utama :**

1. Terdapat IKU akurasi basis data di tahun 2023.
2. Penerimaan negara (biad PPN) melalui mekanisme crash program/keringanan utang ataupun non crash program (dasar hukum crash program 2023 telah terbit, PMK 13 Tahun 2023).
3. Terbitnya PMK 9 Tahun 2023 (turunan PP 28 Tahun 2022).
4. Terbitnya PMK 137 Tahun 2022.

**Implikasi :**

1. Peran aktif K/L dalam penyelesaian piutang Negara.
2. PUPN dapat mengambil Tindakan keperdataan dalam pengurusan piutang Negara.
3. Percepatan penyelesaian piutang pemda.
4. Potensi penerimaan negara dari debitur yang memanfaatkan crash program (per Q3 2023 sudah ada 13 debitur yang memanfaatkan crash program piutang Negara).

**Akar masalah**

1. Sumber penerimaan biad PPN, diperoleh dari BKPN lama yang rutin melakukan angsuran.
2. Kendala melakukan penagihan atas piutang tanpa jaminan.
3. Terdapat piutang pemda yang tidak dapat diserahkan ke PUPN dengan nilai < 8 juta.
4. Beberapa data seperti produk hukum pada aplikasi FocusPN belum didukung bukti.

**Tindakan yang akan dilaksanakan :**

1. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja piutang negara sampai dengan Q3 2023 melalui kegiatan Kupas Piutang Negara.
2. Melakukan Kegiatan Sosialisasi PMK 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN dengan Pemda lingkup Kalimantan Selatan dan Tengah.

**Rekomendasi Rencana Aksi**

1. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi dgn seluruh KPKNL di Kanwil DJKN Kalselteng.
2. Mendorong KPKNL untuk menyusun:
  - a. roadmap percepatan penyelesaian piutang negara dalam 2 tahun kedepan,
  - b. target bersama dan rencana penyelesaian piutang negara dengan penyerah piutang.



### C) Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP Lelang)

Nama Unit	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP Lelang)							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	Oktober	Nov	SM. II	Po/KP
Target	8.200.000.000	8.200.000.000	8.200.000.000	8.200.000.000	8.245.000.000	8.245.000.000	8.277.000.000	
Realisasi	22,07%	42,25%	42,25%	74,52%	111,17%	121,30%	129,86%	
Capaian	1.809.593.333	3.464.461.617	3.464.461.617	6.110.860.347	9.165.762.908	10.000.991.964	10.748.773.182	

#### Isu Utama :

1. Mewujudkan tercapainya target PNBP Lelang.
2. Menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19.
3. Lelang HT seringkali dibatalkan oleh pemohon lelang dikarenakan adanya pelunasan ataupun restrukturisasi.
4. Mendorong UMKM agar memasarkan lelang melalui *platform* lelang.go.id.
5. Terdapat penurunan kinerja oleh salah satu kantor perwakilan Balai Lelang.

#### Implikasi :

Potensi lelang laku rendah akibatnya target PNBP Lelang tidak tercapai. Berkat usaha dan kerja keras target dapat tercapai.

#### Akar masalah

1. Masa pemulihan kondisi pandemi Covid-19.
2. Intensitas pengajuan permohonan lelang menurun khususnya dari perbankan disebabkan karena adanya relaksasi yang dilakukan oleh perbankan nasional terhadap debiturnya.

#### Tindakan yang akan dilaksanakan :

1. Rapat dengan stakeholder diantaranya yaitu Bank BRI, Mandiri, BTN, Pemda Wilayah Kalimantan Tengah dan Pelaku UMKM.
2. Pelaksanaan pembinaan ke KPKNL Palangkaraya, KPKNL Pangkalan Bun, dan KPKNL Banjarmasin.
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi secara rutin pada Desember Tahun 2023.

#### Rekomendasi Rencana Aksi

1. Mendorong KPKNL agar melaksanakan penggalian potensi lelang;
2. Melakukan pembinaan ke KPKNL cq. Pelelang dan ke Pejabat Lelang Kelas II;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan.



#### D) Persentase Peodukrivitas Lelang

Nama Unit	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
	Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	Oktober	Nov	SM. II	Pol/KP
Target	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
Realisasi	68,88%	87,35%	87,35%	109,87%	121,41%	130,72%	131,25%	
Capaian	68,88%	87,35%	87,35%	109,87%	121,41%	130,72%	131,25%	

#### Isu Utama :

1. Banyaknya obyek lelang HT yang tidak laku terjual .
2. Menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19.

#### Implikasi :

1. Penerimaan hasil lelang (PNBP dan Pokok Lelang) tidak optimal.
2. Rendahnya minat masyarakat untuk memanfaatkan jasa lelang.

#### Akar masalah

1. Berkurangnya permohonan lelang dari perbankan yang mempunyai potensi laku.
2. Masyarakat menahan diri untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam penggunaan keuangannya maupun berinvestasi akibat pandemi covid-19 yang tidak dapat dipastikan kapan berakhirnya.

#### Tindakan yang akan dilaksanakan :

1. Rapat dengan stakeholder diantaranya yaitu Bank BRI, Mandiri, BTN, Pemda Wilayah Kalimantan Tengah dan Pelaku UMKM.
2. Pelaksanaan pembinaan ke KPKNL Palangkaraya, KPKNL Pangkalan Bun, dan KPKNL Banjarmasin.
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi secara rutin pada Desember Tahun 2023.

#### Rekomendasi Rencana Aksi

1. Meningkatkan koordinasi/ komunikasi dengan KPKNL dan Pemohon Lelang baik langsung maupun virtual.
2. Memberikan pembinaan dan assistensi kepada KPKNL cq. Pelelang dan ke Pejabat Lelang Kelas II.
3. Melakukan publikasi lelang secara massif melalui media sosial KPKNL dan Kanwil.



## 2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa

### A) Persentase Realisasi Pokok Lelang

Nama Unit	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	Oktober	Nov	SM. II	Pol/KP
Target	372.000.000.000	372.M	372.M	372.M	372.200.000.000	372.200.000.000	377.500.000.000	
Realisasi	21,80%	44,24%	44,24%	76,83%	101,98%	112,66%	121,47%	
Capaian	81.111.860.768	164.585.000.738	164.585.000.738	285.795.917.017	379.582.426.808	419.308.934.002	458.560.688.916	

#### Isu Utama :

1. Mewujudkan tercapainya target Pokok Lelang.
2. Menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19
3. Lelang HT seringkali dibatalkan oleh pemohon lelang dikarenakan adanya pelunasan ataupun restrukturisasi.
4. Mendorong UMKM agar memasarkan lelang melalui *platform* lelang.go.id
5. Terdapat penurunan kinerja oleh salah satu kantor perwakilan Balai Lelang.

#### Implikasi :

Penerimaan hasil lelang rendah akibatnya target pokok lelang tidak tercapai. Berkat usaha dan kerja keras target dapat tercapai.

#### Akar masalah

1. Masa pemulihan kondisi pandemi Covid-19.
2. Intensitas pengajuan permohonan lelang menurun khususnya dari perbankan disebabkan karena adanya relaksasi yang dilakukan oleh perbankan nasional terhadap debiturnya.

#### Tindakan yang akan dilaksanakan :

1. Rapat dengan stakeholder diantaranya yaitu Bank BRI, Mandiri, BTN, Pemda Wilayah Kalimantan Tengah dan Pelaku UMKM.
2. Pelaksanaan pembinaan ke KPKNL Palangkaraya, KPKNL Pangkalan Bun, dan KPKNL Banjarmasin.
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi secara rutin pada Desember Tahun 2023.

#### Rekomendasi Rencana Aksi

1. Mendorong KPKNL agar melaksanakan penggalan potensi lelang;
2. Melakukan pembinaan ke KPKNL cq. Pelelang dan ke Pejabat Lelang Kelas II;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan.



## B) Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

Nama Unit	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	MAK/TLK
Realisasi	36,47%	40,56%	40,56%	86,23%	86,23%	113,51%	113,51%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	113,51%	113,51%	

### Isu Utama :

1. Terdapat IKU akurasi basis data di tahun 2023.
2. Terbitnya PMK 9 Tahun 2023 (turunan PP 28 Tahun 2022).
3. Terbitnya PMK 137 Tahun 2022 tentang penghapusan piutang daerah yang tidak dapat diserahkan ke PUPN.
4. Terbitnya PMK 13 Tahun 2023 sebagai dasar hukum pelaksanaan Crash Program Keringanan Utang 2023.
5. Percepatan peningkatan tahapan pengurusan piutang Negara.

### Implikasi :

1. Meningkatkan akurasi data piutang negara dengan didukung bukti
2. Memperbaiki kualitas piutang negara dengan percepatan tahapan pengurusan piutang Negara.
3. PUPN dapat mengambil Tindakan keperdataan dalam pengurusan piutang Negara.
4. Peran aktif K/L dalam penyelesaian piutang.
5. Percepatan penyelesaian piutang pemda.

### Akar masalah

1. Beberapa data seperti produk hukum pada aplikasi FocusPN belum didukung bukti.
2. Kendala melakukan penagihan atas piutang tanpa jaminan.
3. Terdapat piutang pemda yang tidak dapat diserahkan ke PUPN dengan nilai < 8 juta.

### Tindakan yang akan dilaksanakan :

1. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja piutang negara sampai dengan Q1 2023 melalui kegiatan Kupas Piutang Negara Kalimantan Selatan dan Tengah



2. Melakukan Kegiatan Sosialisasi PMK 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN dengan Pemda lingkup Kalimantan Selatan dan Tengah.
3. Melakukan Kegiatan Koordinasi dengan Anggota PUPN dari Unsur Pemerintah Daerah.

#### **Rekomendasi Rencana Aksi**

1. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi dengan seluruh KPKNL di Kanwil DJKN Kalselteng.
2. Mendorong KPKNL untuk menyusun:
  - a. roadmap percepatan penyelesaian piutang negara dalam 2 tahun kedepan,
  - b. target bersama dan rencana penyelesaian piutang negara dengan penyerah piutang.
3. Mendorong KPKNL untuk berkoordinasi dengan penyerah piutang.

### **3. Pengelolaan Kekayaan Negara yang optimal**

#### **A) Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK**

Bidang PKN	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
T/R	Q1	SM. I	Q3	s.d. Q3	s.d. Desember	Q4	Y-23	Pol/KP
Target		50%	55%	55%				
Realisasi		78,59%	79,64%	79,64%	80,49%	80,49%	80,49%	
Capaian		78,59%	79,64%	79,64%	80,49%	80,49%	80,49%	

#### **Isu Utama :**

1. Capaian hasil perhitungan kesesuaian SBSK belum dapat mencerminkan keadaan sesungguhnya.
2. Kurangnya pemahaman Satuan Kerja dalam penggolongan jenis BMN misalnya tanah yang dimiliki oleh Satuan Kerja merupakan tanah kosong namun diidentifikasi oleh Satuan Kerja sebagai Tanah Bangunan Kantor.

#### **Implikasi :**

Dengan adanya kesalahan dalam mengidentifikasi jenis BMN, mengakibatkan hasil perhitungan SBSK belum sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.



### Akar masalah

Tingkat Pemahaman satker terkait kegiatan Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK masih kurang.

### Tindakan yang akan dilaksanakan :

Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pada Pengelolaan Kekayaan Negara secara bulanan (ND-295/WKN.12/2023, ND-421/WKN.12/2023, ND-544/WKN.12/2023, ND-650/WKN.12/2023, ND-763/WKN.12/2023, dan ND-885/WKN.12/2023, ND-1081/WKN.12/2023, ND-1183/WKN.12/2023, ND-1339/WKN.12/2023, ND-1505/WKN.12/2023, ND-1626/WKN.12/2023)

### Rekomendasi Rencana Aksi

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur setiap bulan untuk memantau perkembangan capaian.
2. Melakukan koordinasi dengan Korwil di lingkungan Kalimantan Selatan dan Tengah.

### B) Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan

Bidang PKN	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	SM. I	Q3	s.d. Q3	s.d. Desember	Q4	Y-23	Po/KP
Target								
Realisasi	203 bidang (K1 – K4)	291 bidang (K1 - K4)	70 bidang K1 + 339 NUP (K2 – K4)	70 bidang K1 + 339 NUP (K2 – K4)	271 bidang K1 + 650 NUP (K2 – K4)	271 bidang K1 + 650 NUP (K2 – K4)	271 bidang K1 + 650 NUP (K2 – K4)	
Capaian	25,09%	86,64%	141,59%	141,59%	152,53%			

### Isu Utama :

1. Bidang tanah yang menjadi target sertifikasi tidak sepenuhnya *clean and clear*.
2. Adanya perbedaan antara target dari Kanwil DJKN Kalselteng dengan Kanwil BPN Kalimantan Tengah dan Kanwil BPN Kalimantan Selatan.
3. Perbedaan konsep program pensertipikatan BMN berupa tanah di tahun 2023.

### Implikasi :

1. Potensi tidak tersertifikasinya seluruh BMN berupa tanah.
2. Ketidaksiesuaian realisasi anggaran sertifikasi BMN.



### Akar masalah

1. Hasil verifikasi bidang tanah yang ditetapkan sebagai target masih terdapat bidang tanah yang tidak *clean and clear*.
2. Terdapat perbedaan target dari Kanwil DJKN Kalselteng dengan Kanwil BPN Kalimantan Tengah dan Kanwil BPN Kalimantan Selatan.

### Tindakan yang akan dilaksanakan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pada Pengelolaan Kekayaan Negara secara bulanan (ND-295/WKN.12/2023, ND-421/WKN.12/2023, ND-544/WKN.12/2023, ND-650/WKN.12/2023, ND-763/WKN.12/2023, dan ND-885/WKN.12/2023, ND-1081/WKN.12/2023, ND-1183/WKN.12/2023, ND-1339/WKN.12/2023, ND-1505/WKN.12/2023, ND-1626/WKN.12/2023).
2. Melakukan monitoring dan evaluasi progress sertifikasi tahun 2023 di wilayah Kalimantan Tengah pada tanggal 13 Maret 2023 secara daring (UND-28/WKN.12/2023 dan ND-414/WKN.12/2023).
3. Melakukan rapat dengan Pangkalan TNU AU dan Zidam VI Mulawarman bersama Kanwil BPN Kalimantan Selatan, Kantah Kota Banjarbaru, Kantah Kab. Banjar, dan KPKNL Banjarmasin (UND-68/WKN.12/2023).
4. Melakukan rapat dengan Kanwil BPN Kalteng, Kantah Lamandau, Satker PJN I, KPKNL Palangka Raya, dan KPKNL Pangkalan Bun pada 18 Juli 2023 (UND-89/WKN.12/2023).
5. Melakukan rapat dengan Kanwil BPN Kalteng, Kantah Lamandau, Satker PJN I, KPKNL Palangka Raya, dan KPKNL Pangkalan Bun pada 28 Agustus 2023 (UND-116/WKN.12/2023).

### Rekomendasi Rencana Aksi

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur setiap bulan untuk memantau perkembangan capaian.
2. Melakukan koordinasi dengan Kanwil BPN Kalimantan Selatan dan Kanwil BPN Kalimantan Tengah.

### C) Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

Nama Unit	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	MAK/TLK
Realisasi	34,38%	51,56%	51,56%	74,63%	74,63%	126,87%	126,87%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	



**Isu Utama :**

1. Terdapat IKU akurasi basis data di tahun 2023.
2. Terbitnya PMK 9 Tahun 2023 (turunan PP 28 Tahun 2022).
3. Terbitnya PMK 137 Tahun 2022 tentang penghapusan piutang daerah yang tidak dapat diserahkan ke PUPN.
4. Terbitnya PMK 13 Tahun 2023 sebagai dasar hukum pelaksanaan Crash Program Keringanan Utang 2023.

**Implikasi :**

1. Data pada aplikasi focusPN didukung bukti sehingga meningkatkan akurasi data.
2. Percepatan penyelesaian piutang negara baik melalui crash program atau non crash program.
3. Memperbaiki kualitas piutang negara dengan percepatan tahaapan pengurusan piutang negara.
4. Peran aktif K/L dalam penyelesaian piutang Negara.
5. Percepatan penyelesaian piutang pemda.
6. PUPN dapat mengambil Tindakan keperdataan dalam pengurusan piutang Negara.

**Akar masalah**

1. Beberapa data seperti produk hukum pada aplikasi FocusPN belum didukung bukti.
2. Kendala melakukan penagihan atas piutang tanpa jaminan.
3. Terdapat piutang pemda yang tidak dapat diserahkan ke PUPN dengan nilai < 8 juta.

**Tindakan yang akan dilaksanakan :**

1. Melakukan Kegiatan Temu Wicara bersama dengan Penyerah Piutang di lingkup Kalimantan Selatan dan Tengah
2. Melakukan sosialisasi mengenai peraturan terbaru yaitu PP 28 tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara kepada para stakeholder di lingkup Kalimantan Tengah, sekaligus membahas isu-isu terkini

**Rekomendasi Rencana Aksi**

1. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi dengan seluruh KPKNL di Kanwil DJKN Kalselteng



2. Mendorong KPKNL untuk menyusun:
  - a. roadmap percepatan penyelesaian piutang negara dalam 2 tahun kedepan,
  - b. target bersama dan rencana penyelesaian piutang negara dengan penyerah piutang.
3. Mendorong KPKNL untuk berkoordinasi dengan penyerah piutang.

#### 4. Pelaksanaan Penilaian yang akuntabel dan profesional

##### A) Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Nama Unit	Nama Sasaran Strategis : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional						
	Nama IKU: Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian						
T/R	Q1	Q2	Q3	s.d. Oktober	Q4	Y-23	Po/KP
Target	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Realisasi	2,41%	1,16%	0,78%	0,77%	0,62%	0,62%	
Capaian	190,38%	195,86%	196,87%	196,91%	197,50%	197,50%	

##### Isu Utama :

1. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan pengelolaan BMN.
2. Objek Penilaian berupa BMN baik pada pengelola barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang dengan tujuan untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.
3. Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.
4. Nilai usulan besaran sewa yang diajukan oleh satuan kerja terkadang merupakan nilai perolehan BMN yang nilainya relatif lebih besar beberapa kali lipat jika dibandingkan dengan nilai sewa BMN.
5. Keterbatasan anggaran untuk melakukan kegiatan survei lapangan.

##### Implikasi :

Terdapat kemungkinan deviasi yang cukup besar antara nilai usulan besaran sewa dan nilai hasil penilaian yang dihasilkan oleh Penilai Pemerintah.



### Akar masalah

Kurangnya koordinasi antara Satuan Kerja Pemohon Sewa dengan Direktorat PKN yang menyebabkan satuan kerja mengajukan nilai perolehan BMN sebagai nilai usulan besaran sewa.

### Tindakan yang akan dilaksanakan :

1. Melakukan koordinasi dengan Direktorat PKN dan Satuan kerja Pemohon Sewa.
2. Melakukan pemantauan capaian IKU melalui channel yang disediakan oleh Kantor Pusat.
3. Melakukan pemantauan capaian IKU yang kemudian disampaikan ke KPKNL tiap awal bulan.

### Rekomendasi Rencana Aksi

1. Melakukan monitoring berkala pada Teams Channel Forum Kawal IKU Deviasi.
2. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait capaian IKU.

### B) Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien

Nama Unit	Nama Sasaran Strategis : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional						
	Nama IKU: Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien						
T/R	Q1	Q2	Q3	s.d. Oktober	Q4	Y-23	PoI/KP
Target	70	70	70	70	70	70	
Realisasi	92,75	89,80	92,35	90,90	90,71	90,71	
Capaian	132,50%	128,29%	131,93%	129,85%	129,59%	129,59%	

### Isu Utama :

1. Ruang lingkup penilaian adalah Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam, kecuali permohonan penilaian yang memerlukan bantuan tenaga penilai dari unit lain.
2. Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon.
3. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon.



**Implikasi :**

Pada KPKNL dengan permohonan penilaian yang tinggi namun SDM dan anggaran yang kurang memadai dapat mempengaruhi capaian IKU.

**Akar masalah**

Formula perhitungan capaian IKU yang dimulai dari surat/nota dinas masuk permohonan penilaian dan selesai saat laporan penilaian disampaikan kepada pemohon dapat menyebabkan capaian IKU yang kurang optimal pada KPKNL yang permohonan penilaiannya tinggi namun SDMnya kurang memadai.

**Tindakan yang akan dilaksanakan :**

1. Melakukan koordinasi dengan KPKNL dan memberikan bantuan tenaga penilai apabila dibutuhkan.
2. Melakukan pemantauan capaian IKU melalui tautan yang disediakan oleh Kantor Pusat
3. Melakukan pemantauan capaian IKU yang kemudian disampaikan ke KPKNL tiap awal bulan.

**Rekomendasi Rencana Aksi**

1. Memberikan bantuan tenaga penilai kepada KPKNL ketika dibutuhkan.
2. Melakukan pemantauan capaian IKU.

**5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang efektif**

**A) Persentase Pelaksanaan permohonan Lelang Online**

Nama Unit	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	Oktober	Nov	SM. II	Po/KP
Target	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	
Realisasi	99,39%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	99,39%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

**Isu Utama :**

1. Mewujudkan pelaksanaan permohonan lelang online.
2. Meminimalisir pelaksanaan permohonan secara manual.



**Implikasi :**

Tujuan lelang secara efektif, efisien melalui pemandaatan teknologi tidak tercapai.

**Akar masalah**

1. Kesalahan penginputan pada aplikasi sharing folder Dropbox dengan tidak mencantumkan tiket permohonan online.
2. Aplikasi permohonan online kurang familiar bagi masyarakat awam khususnya untuk masyarakat di pedesaan.

**Tindakan yang akan dilaksanakan :**

1. Melakukan monitoring dan evaluasi dengan PIC KPKNL terkait pelaporan dengan mengoptimalkan grup WA dengan PIC KPKNL;
2. Melakukan monitor secara berkala pada sharing folder Dropbox;
3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder untuk selalu mengajukan permohonan lelang secara online.

**Rekomendasi Rencana Aksi**

1. Melakukan monitoring dan evaluasi dengan PIC KPKNL terkait pelaporan.
2. Meningkatkan koordinasi kepada stakeholder terkait kelebihan pelaksanaan permohonan lelang online.

**B) Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)**

Bidang PKN	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	SM. I	Q3	s.d. Q3	s.d. Desember	Q4	Y-23	PoI/KP
Target	12%		75%	75%				
Realisasi	52	134	244	244	376			
Capaian	15,46%	52,17%	99,95%	99,95%	151,53%			

**Isu Utama :**

1. BMN yang dijadikan target pada Portofolio Asset ditentukan sendiri oleh KPKNL.



**Implikasi :**

Tidak dapat mendorong satker/korwil target agar segera berkoordinasi dengan KPKNL untuk melaksanakan pengisian formulir pendataan portofolio aset karena target ditentukan

**Akar masalah**

Terkait target portofolio aset tidak ditentukan oleh Kantor Pusat, KPKNL bebas memilih target sendiri sepanjang sesuai dengan ketentuan.

**Tindakan yang akan dilaksanakan :**

Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pada Pengelolaan Kekayaan Negara secara bulanan (ND-295/WKN.12/2023, ND-421/WKN.12/2023, ND-544/WKN.12/2023, ND-650/WKN.12/2023, ND-763/WKN.12/2023, dan ND-885/WKN.12/2023, ND-1081/WKN.12/2023, ND-1183/WKN.12/2023, ND-1339/WKN.12/2023, ND-1505/WKN.12/2023, ND-1626/WKN.12/2023).

**Rekomendasi Rencana Aksi**

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur setiap bulan untuk memantau perkembangan capaian.
2. Melakukan koordinasi dengan Korwil di lingkungan Kalimantan Selatan dan Tengah.

**6. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang efektif**

**Persentase Tindak Lanjut persetujuan pengelolaan Barang Milik Negara**

Bidang PKN	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							
	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara							
T/R	Q1	SM. I	Q3	s.d. Q3	s.d. Desember	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-							
Realisasi	140 TL	202 TL	261 TL dari 266 persetujuan	261 TL dari 266 persetujuan	2636TL dari 266 persetujuan			
Capaian	76,92%	80,16%	98,12%	98,12%	100%			

**Isu Utama :**

1. Terdapat satuan kerja yang tidak dapat menindaklanjuti persetujuan, khususnya pemanfaatan.
2. Terdapat pelaksanaan lelang yang terjadi TAP.



**Implikasi :**

Jika ada persetujuan yang tidak ditindaklanjuti oleh satuan kerja, maka penerimaan negara bukan pajak tidak akan optimal.

**Akar masalah**

1. Adanya persetujuan yang tidak ditindaklanjuti, misalnya karena mitra berubah pikiran atau pun tidak ada penawaran pada lelang.

**Tindakan yang akan dilaksanakan :**

Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pada Pengelolaan Kekayaan Negara secara bulanan (ND-295/WKN.12/2023, ND-421/WKN.12/2023, ND-544/WKN.12/2023, ND-650/WKN.12/2023, ND-763/WKN.12/2023, dan ND-885/WKN.12/2023, ND-1081/WKN.12/2023, ND-1183/WKN.12/2023, ND-1339/WKN.12/2023, ND-1505/WKN.12/2023, ND-1626/WKN.12/2023).

**Rekomendasi Rencana Aksi**

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur setiap bulan untuk memantau perkembangan capaian.
2. Melakukan koordinasi dengan Korwil di lingkungan Kalimantan Selatan dan Tengah.

**7. Penguatan Pengelolaan Keuangan yang optimal**

**A) Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran**

Nama Unit	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	95,5%	95,5%	95,5%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	99,99%	99,49%	99,49%	99,93%	99,93%	96,69%	96,69%	
Capaian	114,6%	114,6%	114,6%	120%	120%	109,54%	109,54%	

**Isu Utama :**

1. Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran, terdapat beberapa perubahan kewenangan revisi anggaran.



3. S-151/KPN.2602/2023 hal Pelaporan Data Capaian Output Belanja K/L TA 2023 pada Aplikasi SAKTI.
4. Nilai Smart DJA baru dapat diketahui pada triwulan IV.

**Implikasi :**

1. Implementasi Peraturan Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-5/PB/2022;
2. Kemudahan dalam melakukan revisi anggaran kewenangan Kanwil Perbendaharaan;
3. Implementasi S-151/KPN.2602/2023.

**Akar masalah**

1. Satuan kerja diberikan kesempatan 1 kali revisi kewenangan Kanwil Perbendaharaan setiap triwulan sehingga rencana kerja harus disusun dengan baik.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran serta penilaian IKPA TA 2023.
3. Optimalisasi Belanja Modal dilaksanakan pada bulan Agustus 2023.

**Tindakan yang akan dilaksanakan :**

1. Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dengan mengirimkan Kartu Pengawasan (Karwas) secara rutin setiap bulan;
2. Telah dilaksanakan revisi Kanwil Perbendaharaan demi terlaksananya penyerapan anggaran dan rencana penarikan dana yang optimal;
3. Permintaan Rencana Kerja Bagian/Bidang dan usulan revisi anggaran Triwulan IV pada Bidang/Bagian di Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah;
4. Melakukan koordinasi dengan bidang dan bagian terkait penyerapan anggaran setiap bulan; dan
5. Pengisian realisasi capaian output bulan Desember 2023 sebagai data dukung penyusunan laporan SAKTI dan e-monev Bappenas.

**Rekomendasi Rencana Aksi**

1. Melakukan Revisi Kewenangan Kanwil Perbendaharaan terkait pemenuhan kebutuhan organisasi dan pencapaian Nilai IKU IKKPA pada komponen Halaman III DIPA;
2. Melaksanakan pelaporan rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
3. Melakukan koordinasi dengan Bagian/Bidang terkait rencana kerja triwulanan.



## B) Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN di Bidang Lelang

Nama Unit	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN di Bidang Lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	Oktober	Nov	SM. II	Poi/KP
Target	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

### Isu Utama :

1. Deviasi data antara dropbox dengan OM SPAN.

### Implikasi :

Data PNBP Bea Lelang yang disajikan menjadi tidak akurat.

### Akar masalah

1. Kesalahan penginputan pada aplikasi sharing folder Dropbox ataupun pada aplikasi OM SPAN.
2. Pengambilan cut off date data yang berbeda sehingga menyebabkan perbedaan data khususnya di Pegadaian.
3. Kesalahan penyetoran bea lelang yang dilakukan oleh Pemohon Lelang.

### Tindakan yang akan dilaksanakan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi dengan PIC KPKNL terkait pelaporan dengan mengoptimalkan grup WA dengan PIC KPKNL;
2. Melakukan monitor secara berkala pada aplikasi OMSPAN;
3. Melakukan Rekonsiliasi dengan Pihak Internal (Bagian Umum) dan Eksternal (Pegadaian).

### Rekomendasi Rencana Aksi

1. Melakukan monitoring dan evaluasi dengan PIC KPKNL terkait pelaporan.
2. Melakukan monitor secara berkala pada aplikasi OMSPAN.
3. Melakukan Rekonsiliasi dengan Pihak Internal (Bagian Umum) dan Eksternal (Pegadaian).



## 8. Organisasi dan SDM yang Berkinerja tinggi

### A) Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Nama Unit	SDM yang Kompeten							
	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	40%	85%	85%	114,89%	114,89%	120%	120%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

#### Isu Utama :

1. Sertifikat pelatihan berupa e-sertifikat yang dikirim langsung ke akun pegawai baik melalui HRIS maupun [semantik.bppk.kemenkeu.go.id](http://semantik.bppk.kemenkeu.go.id), pengelola kepegawaian tidak punya alat untuk memonitor sertifikat yang sudah diterima oleh pegawai.
2. Persentase untuk pengembangan kompetensi pegawai sudah melebihi target namun pegawai masih harus mengembangkan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Implikasi :

Walaupun realisasi IKU Q4 telah tercapai namun pegawai masih harus mengembangkan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Akar masalah

1. Ada pegawai yg tidak aktif untuk melaksanakan *e-learning open class* yang ditawarkan melalui [kic2.kemenkeu.go.id](http://kic2.kemenkeu.go.id) dan <http://10.242.77.20/diklat>.
2. Kesulitan pencatatan/ pendataan pengembangan kompetensi yang telah dilakukan oleh pegawai.
3. Pelaksanaan sharing knowledge masih dilaksanakan guna memfasilitasi pegawai yang telah mengikuti pelatihan.

#### Tindakan yang akan dilaksanakan :

1. Melakukan pendataan sertifikat diklat.
2. Mengusulkan diklat secara e-learning dengan tema yang beragam sehingga pegawai berminat utk diklat secara e-learning.
3. Membuat Undangan pelaksanaan sharing knowledge pegawai sesuai jadwal.



### Rekomendasi Rencana Aksi

1. Memonitor Capaian realisasi iku setiap triwulan.
2. Mengusulkan diklat secara e-learning dengan tema yang mengutamakan sesuai dengan tusinya.
3. Melakukan pendataan dan pengumpulan sertifikat diklat.

## B. Realisasi Anggaran

### 1. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

#### A. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Triwulan I

Indikator IKU	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
<b>A) Nilai IKPA (Bobot 100%)</b>			<b>100.00</b>
1. Revisi DIPA	100.00	10	10.00
2. Deviasi Hal III DIPA	100.00	10	10.00
3. Penyerapan Anggaran	100.00	20	20.00
4. Belanja Kontraktual	100.00	10	10.00
5. Penyelesaian Tagihan	100.00	10	10.00
6. Pengelolaan UP dan TUP	100.00	10	10.00
7. Dispensasi SPM	100.00	5	5.00
8. Capaian Output	100.00	25	25.00
<b>B) Nilai SMART (Bobot 0%)</b>			
<b>Nilai Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan I</b>			<b>100.00</b>
<b>Target IKU IKKPA</b>			<b>95.50</b>
<b>Realisasi IKU IKKPA Triwulan I</b>			<b>114.60</b>
<b>Indeks Capaian Kinerja IKU IKKPA Triwulan I</b>			<b>120.00%</b>

- Isu Utama yang dihadapi :
  1. Implementasi Peraturan Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-5/PB/2022
  2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran, terdapat beberapa perubahan kewenangan revisi anggaran.
  3. Nilai SMART DJA baru dapat diketahui pada Triwulan IV
- Akar permasalahan yang dihadapi, yaitu :

Satuan kerja diberikan kesempatan 1 kali revisi kewenangan Kanwil Perbendaharaan setiap triwulan sehingga rencana kerja harus disusun dengan baik dan tepat



- Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilaksanakan, diantaranya :
  1. Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dengan mengirimkan Kartu Pengawasan (Karwas) secara rutin setiap bulan;
  2. Telah dilaksanakan revisi Kanwil Perbendaharaan demi terlaksananya penyerapan anggaran dan rencana penarikan dana yang optimal;
  3. Permintaan Rencana Kerja Bagian/Bidang dan usulan revisi anggaran Triwulan II pada Bidang/Bagian di Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah;
  4. Melakukan koordinasi dengan bidang dan bagian terkait penyerapan anggaran setiap bulan.
  
- Rekomendasi Rencana Aksi :
  1. Melakukan Revisi Kewenangan Kanwil Perbendaharaan terkait pemenuhan kebutuhan organisasi dan pencapaian Nilai IKU IKKPA pada komponen Halaman III DIPA;
  2. Melaksanakan pelaporan rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  3. Melakukan koordinasi dengan Bagian/Bidang terkait rencana kerja triwulan II.

#### B. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Triwulan II

Indikator IKU	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
<b>A) Nilai IKPA (Bobot 100%)</b>			<b>99.49</b>
1. Revisi DIPA	100.00	10	10.00
2. Deviasi Hal III DIPA	94.94	10	9.49
3. Penyerapan Anggaran	100.00	20	20.00
4. Belanja Kontraktual	100.00	10	10.00
5. Penyelesaian Tagihan	100.00	10	10.00
6. Pengelolaan UP dan TUP	99.95	10	10.00
7. Dispensasi SPM	100.00	5	5.00
8. Capaian Output	100.00	25	25.00
<b>B) Nilai SMART (Bobot 0%)</b>			
<b>Nilai Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan II</b>			<b>99.49</b>
<b>Target IKU IKKPA</b>			<b>95.50</b>
<b>Realisasi IKU IKKPA Triwulan II</b>			<b>114.60</b>
<b>Indeks Capaian Kinerja IKU IKKPA Triwulan II</b>			<b>120.00%</b>

- Isu Utama yang dihadapi :
  - a. Implementasi Peraturan Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-5/PB/2022
  - b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran, terdapat beberapa perubahan kewenangan revisi anggaran.
  - c. Nilai SMART DJA baru dapat diketahui pada Triwulan IV



- Akar permasalahan yang dihadapi, yaitu :
  1. Satuan kerja diberikan kesempatan 1 kali revisi kewenangan Kanwil Perbendaharaan setiap triwulan sehingga rencana kerja harus disusun dengan baik dan tepat;
  2. Optimalisasi Belanja Modal akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2023
  
- Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilaksanakan, diantaranya :
  1. Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dengan mengirimkan Kartu Pengawasan (Karwas) secara rutin setiap bulan;
  2. Telah dilaksanakan revisi Kanwil Perbendaharaan demi terlaksananya penyerapan anggaran dan rencana penarikan dana yang optimal;
  3. Permintaan Rencana Kerja Bagian/Bidang dan usulan revisi anggaran Triwulan III pada Bidang/Bagian di Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah;
  4. Melakukan koordinasi dengan bidang dan bagian terkait penyerapan anggaran setiap bulan.
  
- Rekomendasi Rencana Aksi :
  1. Melakukan Revisi Kewenangan Kanwil Perbendaharaan terkait pemenuhankebutuhan organisasi dan pencapaian Nilai IKU IKKPA pada komponen Halaman III DIPA;
  2. Melaksanakan pelaporan rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  3. Melakukan koordinasi dengan Bagian/Bidang terkait rencana kerja Triwulan III

### C. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Triwulan III

Indikator IKU	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
<b>A) Nilai IKPA (Bobot 100%)</b>			<b>99.93</b>
1. Revisi DIPA	100.00	10	10.00
2. Deviasi Hal III DIPA	100.00	10	10.00
3. Penyerapan Anggaran	100.00	20	20.00
4. Belanja Kontraktual	100.00	10	10.00
5. Penyelesaian Tagihan	100.00	10	10.00
6. Pengelolaan UP dan TUP	99.60	10	9.96
7. Dispensasi SPM	100.00	5	5.00
8. Capaian Output	99.88	25	24.97
<b>B) Nilai SMART (Bobot 0%)</b>			
<b>Nilai Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan III</b>			<b>99.93</b>
<b>Target IKU IKKPA</b>			<b>100.00</b>
<b>Realisasi IKU IKKPA Triwulan III</b>			<b>120.00</b>
<b>Indeks Capaian Kinerja IKU IKKPA Triwulan III</b>			<b>120.00%</b>



- Isu Utama yang dihadapi :
  1. Implementasi Peraturan Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-5/PB/2022
  2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran, terdapat beberapa perubahan kewenangan revisi anggaran
  3. Nilai SMART DJA baru dapat diketahui pada Triwulan IV
  
- Akar permasalahan yang dihadapi, yaitu :
  1. Satuan kerja diberikan kesempatan 1 kali revisi kewenangan Kanwil Perbendaharaan setiap triwulan sehingga rencana kerja harus disusun dengan baik dan tepat;
  2. Optimalisasi Belanja Modal akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2023.
  
- Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilaksanakan, diantaranya :
  1. Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dengan mengirimkan Kartu Pengawasan (Karwas) secara rutin setiap bulan;
  2. Telah dilaksanakan revisi Kanwil Perbendaharaan demi terlaksananya penyerapan anggaran dan rencana penarikan dana yang optimal;
  3. Permintaan Rencana Kerja Bagian/Bidang dan usulan revisi anggaran Triwulan III pada Bidang/Bagian di Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah;
  4. Melakukan koordinasi dengan bidang dan bagian terkait penyerapan anggaran setiap bulan.
  
- Rekomendasi Rencana Aksi :
  1. Melakukan Revisi Kewenangan Kanwil Perbendaharaan terkait pemenuhan kebutuhan organisasi dan pencapaian Nilai IKU IKKPA pada komponen Halaman III DIPA;
  2. Melaksanakan pelaporan rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  3. Melakukan koordinasi dengan Bagian/Bidang terkait rencana kerja triwulan III.



**D. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV**

Indikator IKU	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
<b>A) Nilai IKPA (Bobot 50%)</b>			<b>99.43</b>
1. Revisi DIPA	100.00	10	10.00
2. Deviasi Hal III DIPA	94.86	10	9.49
3. Penyerapan Anggaran	100.00	20	20.00
4. Belanja Kontraktual	100.00	10	10.00
5. Penyelesaian Tagihan	100.00	10	10.00
6. Pengelolaan UP dan TUP	99.47	10	9.95
7. Dispensasi SPM	100.00	5	5.00
8. Capaian Output	100.00	25	25.00
<b>B) Nilai SMART (Bobot 50%)</b>			<b>93.95</b>
1. Capaian Output	100.00	43.50%	43.50
2. Efisiensi	82.36	28.60%	23.55
3. Konsistensi RPD	99.26	18.20%	18.07
4. Penyerapan Anggaran	91.06	9.70%	8.83
<b>Nilai Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan IV</b>			<b>96.69</b>
<b>Realisasi IKU IKKPA Triwulan IV</b>			<b>109.54</b>

- Isu Utama yang dihadapi :
  1. Implementasi Peraturan Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-5/PB/2022;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran, terdapat beberapa perubahan kewenangan revisi anggaran;
  3. Nilai SMART DJA baru dapat diketahui pada Triwulan IV
  
- Akar permasalahan yang dihadapi, yaitu :
  1. Satuan kerja diberikan kesempatan 1 kali revisi kewenangan Kanwil Perbendaharaan setiap triwulan sehingga rencana kerja harus disusun dengan baik dan tepat;
  2. Optimalisasi Belanja Modal akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2023.
  
- Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilaksanakan, diantaranya :
  1. Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dengan mengirimkan Kartu Pengawasan (Karwas) secara rutin setiap bulan;
  2. Telah dilaksanakan revisi Kanwil Perbendaharaan demi terlaksananya penyerapan anggaran dan rencana penarikan dana yang optimal;
  3. Permintaan Rencana Kerja Bagian/Bidang dan usulan revisi anggaran Triwulan IV pada Bidang/Bagian di Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah;
  4. Melakukan koordinasi dengan bidang dan bagian terkait penyerapan anggaran setiap bulan.



➤ Rencana Aksi tahun 2024:

1. Melakukan Revisi Kewenangan Kanwil Perbendaharaan terkait pemenuhan kebutuhan organisasi dan pencapaian Nilai IKU IKKPA pada komponen Halaman III DIPA;
2. Melaksanakan pelaporan rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Melakukan koordinasi dengan Bagian/Bidang terkait rencana kerja triwulan IV.

### C. Inovasi

Untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan dan peningkatan kualitas kinerja dan pembinaan, kami melakukan beberapa inovasi, baik di bidang Non IT maupun IT, antara lain sebagai berikut :

Inovasi Non-IT :

- ◆ Pelaksanaan pelayanan Penilaian BMN dalam rangka pemindahtanganan, dari 15 hari kerja, menjadi hanya 13 hari kerja;
- ◆ Pelaksanaan pelayanan Penilaian BMN dalam rangka pemanfaatan dari 25 hari kerja, menjadi hanya 20 hari kerja;
- ◆ Penyampaian Surat Pemberitahuan Keputusan Penghapusan Secara Mutlak Atas Piutang Instansi Pemerintah Daerah dari 15 hari kerja menjadi 7 hari kerja.

Inovasi IT :

- **Aplikasi Alabio** adalah aplikasi pembinaan Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah kepada KPKNL yang dilakukan secara online. Keunggulan Alabio adalah Aplikasi Alabio sudah di hosting di server kemenkeu.go.id dengan alamat [alabio.kemenkeu.go.id](http://alabio.kemenkeu.go.id)



Halaman Utama Aplikasi Alabio



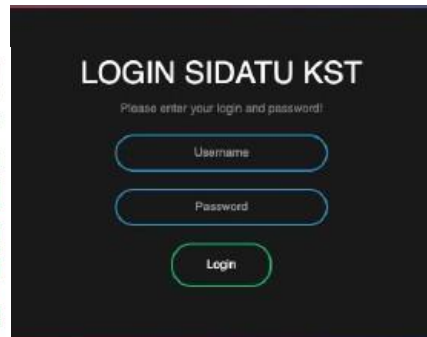
- **Aplikasi SiDatu** adalah aplikasi online yang memiliki fitur terkait layanan DJKN maupun konsultasi online. Aplikasi ini dapat diunduh dan tersedia di Play Store.

Keunggulan SiDatu:

1. Mudah diakses melalui internet : [kanwilkst.ddns.net/sidatu/](http://kanwilkst.ddns.net/sidatu/)
2. Playstore (Untuk Stakeholder) :

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sidatu.sidatu>

3. Scan QR Code



- **Scan QR Code pada Aplikasi Peduli Lindungi.** Dalam rangka penguatan protokol kesehatan sebagaimana Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penguatan Protokol Kesehatan dalam TataKelola Instansi Pemerintah dalam Masa Pandemi COVID-19. Scan QR Code dilakukan oleh seluruh pejabat/pegawai/tamu yang akan memasuki dan meninggalkan gedung Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah. QR Code tersebut terdapat diPintu Utama dan Pintu Samping

**Scan Disini**  
Sebelum memasuki lokasi ini,  
Scan Kode QR untuk pelacakan kontak

**Pintu Utama**  
Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah

**CARA SCAN QR CODE**

- 1 Instal PeduliLindungi**  
Download aplikasi PeduliLindungi melalui Google Play dan App Store atau dengan scan Kode QR ini
- 2 Buat Akun**  
Lakukan registrasi untuk membuat akun. Sudah punya akun? Silakan login dengan akun tersebut
- 3 Scan QR**  
Tekan "Scan QR Code" di Salaman Home dan konfirmasi... Check-in ke lokasimu

Semua informasi yang dikumpulkan oleh PeduliLindungi hanya digunakan untuk tujuan pelacakan kontak. Informasi Anda bersifat rahasia. Informasi itu hanya akan diketahui oleh Pejabat Kesehatan Masyarakat sesuai Instruksi Presiden (INPRES) tentang penanganan dan pencegahan COVID-19. Informasi lebih lanjut kunjungi: [pedulilindungi.id/kabijakan-privasi-data](https://pedulilindungi.id/kabijakan-privasi-data)



- **Aplikasi SIBEKANTAN KST** adalah alat bantu sistem money yang memudahkan dalam monitoring dan evaluasi sasaran strategis dan mendapatkan informasi terkait capaian kinerja secara cepat dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah. Aplikasi ini dikembangkan berbasis web sehingga dapat diakses menggunakan browser melalui alamat [https://sites.google.com/view/si-bekantan\\_](https://sites.google.com/view/si-bekantan_)



## D. Prestasi dan Penghargaan

Sebagai bukti dari hasil kerja keras kami selama ini, kami telah berhasil mendapat penghargaan, yaitu :

1. Juara 1 Kantor Wilayah Terbaik dalam Lomba Implementasi Budaya Kerja Kolaborasi Digital Kemenkeu 2023





2. Juara 1 NKO 119,03 Semester I Tahun 2023 Predikat ISTIMEWA



3. Juara 2 Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN 2022/2023 Kategori Optimalisasi Aset pada Pengguna Barang



4. Juara II Kompetisi Inovasi Kekayaan Negara (KIKN) Tahun 2023 Klaster Inovasi Kantor Vertikal (Alabio KST) tahun 2023





5. Juara 1 Lomba Kolaborasi Digital Kategori Kantor Wilayah



6. Peringkat 5 Kompetisi Data Analitik, dalam rangkaian kegiatan Membangun Budaya Data DJKN Tahun 2022 dengan judul “data Leasing UMKM Untuk Peningkatan Pemberdayaan UMKM di Lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah”



7. Predikat Juara 1 Kantor Wilayah Terbaik, Atas partisipasinya dalam Tim Lomba Implementasi Budaya Kerja Kolaborasi Digital Kemenkeu Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, an. Mohammad Eko Agus Yudianto





8. Predikat Juara 1 Kantor Wilayah Terbaik, Atas partisipasinya dalam Tim Lomba Implementasi Budaya Kerja Kolaborasi Digital Kemenkeu Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, an. Relita Mega Asia



9. Predikat Juara 1 Kantor Wilayah Terbaik, Atas partisipasinya dalam Tim Lomba Implementasi Budaya Kerja Kolaborasi Digital Kemenkeu Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, an. Putri Prama Ananta





10. TOP 10 (SEPULUH) Inovasi Terbaik pada kompetisi Inovasi Kekayaan Negara Tahun 2023  
Klaster Kantor Vertikal ALABIO: Transformasi Pembinaan di Era Digital

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
KEKAYAAN NEGARA  
NOMOR KEP-167/KN/2023 TENTANG  
PENETAPAN INOVASI TERBAIK PADA  
KOMPETISI INOVASI KEKAYAAN NEGARA  
TAHUN 2023

TOP 10 (SEPULUH) INOVASI TERBAIK  
PADA KOMPETISI INOVASI KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2023

NO.	JUDUL INOVASI	UNIT PENGUSUL
<b>A. KLUSTER KANTOR PUSAT DAN BADAN LAYANAN UMUM</b>		
1.	Penggunaan Analisis <i>Geospasial</i> dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DJKN: Studi Kasus Pengelolaan BMN berupa Tanah dan Aset Lain-lain pada Daerah Rawan Bencana Gempa Bumi	Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi
2.	Sistem Informasi Penilaian (SIP)	Direktorat Penilaian
3.	Aplikasi Siprita - Suarakan Aspirasi Kariermu	Sekretariat Direktorat Jenderal
4.	Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara
5.	<i>Crash Program</i> Keringanan Utang	Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara
<b>B. KLUSTER KANTOR VERTIKAL</b>		
1.	Lelang Gorontalo (LEGO)	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo
2.	ALABIO: Transformasi Pembinaan di Era Digital	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah
3.	Pojok Wani: Layanan SKPT Online, Penerbitan Kode Billing Pembayaran BPHTB Online, Validasi Pajak Penghasilan Online dan Permohonan Digital Pasca Lelang (e-form)	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya
4.	Identifikasi Setoran Piutang Negara secara Otomatis melalui <i>Virtual Account</i>	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro
5.	Sistem Informasi Kaji Ulang (SIKAJUL)	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik  
RIONALD SILABAN

11. Piagam Manajemen Risiko Organisasi Terbaik II 2023





12. Piagam NKO 116,93 tahun 2023 dengan predikat ISTIMEWA





## **BAB IV PENUTUP**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi segenap jajaran Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah melakukannya dengan penuh kesungguhan yang berdampak pada pencapaian IKU yang telah ditargetkan. Terdapat beberapa kunci sukses dalam pencapaian IKU sebagai berikut:

1. Menyesuaikan pola kerja dan *mindset* bekerja dengan kondisi tatanan normal baru dengan mematuhi protokol kesehatan.
2. Menyusun database sehingga terbentuk validasi data dimana sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan strategis untuk memudahkan dalam pencapaian target IKU.
3. Bersinergi dengan meningkatkan koordinasi yang intensif dengan internal yaitu antar Bidang/Bagian maupun dengan masing-masing KPKNL, serta eksternal dengan semua *stakeholder* sehingga memiliki persepsi dan langkah yang sama dalam pencapaian IKU.
4. Melakukan monev secara berkala untuk mengevaluasi tahapan pencapaian target per periode.

Selanjutnya, sangat diharapkan apa yang telah diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan lebih baik lagi. Semoga apa yang telah dicapai dapat bermanfaat luas bagi masyarakat, bangsa dan negara.



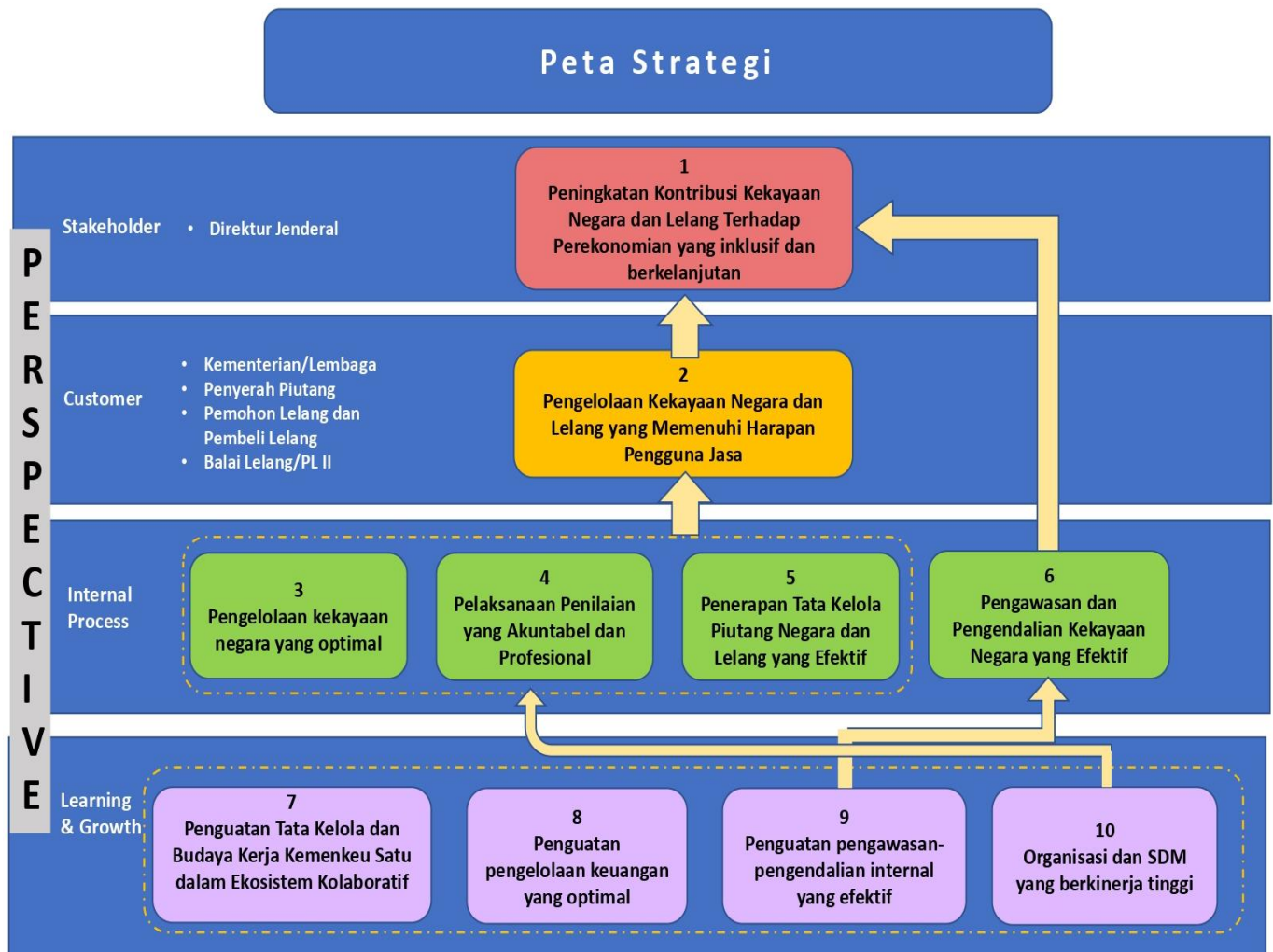
**Lampiran :**

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



PERJANJIAN KINERJA  
NOMOR: PK-24/KN/2023  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2023

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN**  
**NEGARA KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP Persentase produktivitas lelang	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%
		3b-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	100%
		3c-CP Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		3d-N Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%
		4b-N Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-N Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86%
		5b-N Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	15%
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	6a-N Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	7a-N Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu	100 (95%)
		7a1-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100 (3,55 skala 4)
		7a2-N Implementasi budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	100 (90%)
8	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	8a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
		8b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
9	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	9a-CP Indeks Integritas Organisasi	94,33
		9a1-CP Indeks integritas	88,67
		9a2-CP Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100 (Level 4)
		9b-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60
10	Organisasi dan SDM yang	10a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%

	berkinerja tinggi	10b-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80
--	-------------------	--	----

Kegiatan		Anggaran
<b>Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>	Rp	480.548.000
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	13.716.000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp	13.134.000
3. Pengelolaan Aset	Rp	452.422.000
4. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara		
5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara		
6. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp	1.276.000
<b>Dukungan Manajemen</b>	Rp	2.227.627.000
1. Legislasi dan Litigasi	Rp	2.832.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	2.188.692.000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp	25.031.000
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM		
5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	11.072.000
6. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi		

Jakarta, 30 Januari 2023

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik  
Rionald Silaban

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Tengah



Ditandatangani Secara Elektronik  
Ferdinan Lengkong



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
NEGARA KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2023**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.							
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10%	30%	30%	60%	60%	100	100
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
3a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK		50%	50%	55%	55%	68%	68%
3b-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan		40%	40%	60%	60%	100%	100%
3c-CP	Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10%	20%	30%	60%	60%	100	100
3d-N	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12%	32%	32%	75%	75%	100%	100%
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
4a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
4b-N	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
5a-N	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	20%	40%	40%	63%	63%	86%	86%
5b-N	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							
6a-N	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara		50%	50%		50%	86%	86%
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif							
7a-N	Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu	100 (20%)	100 (72,5 %)	100 (72,5 %)	100 (85%)	100 (85%)	100 (95%)	100 (95%)
	7a1-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan		100 (3,44 skala 4)	100 (3,44 skala 4)		100 (3,44 skala 4)	100 (3,44 skala 4)	100 (3,44 skala 4)

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	7a2-N Implementasi budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	100 (20%)	100 (45%) )	100 (45%)	100 (70%)	100 (70%)	100 (90%)	100 (90%)
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5 %	95,5 %	95,5 %	95,5 %	95,5%	95,5%
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%
9	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif							
9a-CP	Indeks Integritas Organisasi						94,33	94,33
	9a1-CP Indeks integritas						88,67	88,67
	9a2-CP Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP						100 (level 4)	100 (level 4)
9b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif						60	60
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
10a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
10b-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko						80	80

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah,



Diandatangani Secara Elektronik  
Ferdinand Lengkon



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2023**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. / Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Daftar Aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Bidang/Seksi PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan  
 Negara Kalimantan Selatan dan Tengah



Ditandatangani Secara Elektronik  
 Ferdinan Lengkong



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Ferdinan Lengkong, S.H.	NAMA	Rionald Silaban
NIP	196612121991031001	NIP	196604231990101001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah	JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	Penerima Layanan
		Persentase produktivitas lelang	80	Penerima Layanan
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100	Penerima Layanan
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100	Penerima Layanan
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68	Proses Bisnis



	Negara)	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan		100	Proses Bisnis
		Persentase Penyelesaian BKPN		100	Proses Bisnis
		Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)		100	Proses Bisnis
4.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian		25	Proses Bisnis
		Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien.		70	Proses Bisnis
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online		86	Proses Bisnis
		Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN		15	Proses Bisnis
6.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara		86	Proses Bisnis
7.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu		100 (95%)	Penguatan Internal atau Anggaran
		Sub-IKI 1	Indeks efektifitas ekosistem kehumasan	100 (3,55 skala 4)	Penguatan Internal atau Anggaran
		Sub-IKI 2	Implementasi budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	100 (90%)	Penguatan Internal atau Anggaran
8.	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran		95,5	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan		100	Penguatan Internal atau Anggaran



9.	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks Integritas Organisasi		94,33	Penguatan Internal atau Anggaran
		Sub-IKI 1	Indeks Integritas	88,67	Penguatan Internal atau Anggaran
		Sub-IKI 2	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	100 (level 4)	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif		60	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai		100	Penguatan Internal atau Anggaran
	(Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko		80	Penguatan Internal atau Anggaran
<b>B. TAMBAHAN</b>					
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	Penyelesaian Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN 22/23		100	Penerima Layanan

#### PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu</p>



PERILAKU KERJA		
		pelayanan.
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>



PERILAKU KERJA		
	- Menjaga rahasia jabatan dan negara	
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik  
Ferdinan Lengkong  
196612121991031001



30 Januari 2023  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik  
Rionald Silaban  
196604231990101001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	55 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10	30	30	60	60	100	100
2	Persentase produktivitas lelang	30	45	45	60	60	80	80
3	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20	40	40	70	70	100	100
4	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10	30	30	60	60	100	100
5	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK		50	50	55	55	68	68



6	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan		40	40	60	60	100	100
7	Persentase Penyelesaian BKPN	10	20	30	60	60	100	100
8	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12	32	32	75	75	100	100
9	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25	25	25	25	25	25	25
10	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70
13	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	20	40	40	63	63	86	86
14	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	15	15	15	15	15	15	15
15	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara		50	50		50	86	86
16	Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu	100 (20%)	100 (72,5%)	100 (72,5%)	100 (85%)	100 (85%)	100 (95%)	100 (95%)



12	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan		100 (3,44 skala 4)	100 (3,44 skala 4)		100 (3,44 skala 4)	100 (3,44 skala 4)	100 (3,44 skala 4)
13	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	100 (20%)	100 (45%)	100 (45%)	100 (70%)	100 (70%)	100 (90%)	100 (90%)
15	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
16	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10	50	50	85	85	100	100
17	Indeks Integritas Organisasi						94,33	94,33
18	Indeks Integritas						88,67	88,67
19	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP						96,22	96,22
20	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif						60	60
21	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15	40	40	75	75	100	100
22	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko						80	80
<b>KONSEKUENSI</b>								
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.							



2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
----	---

Pegawai yang Dinilai,

30 Januari 2023  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik  
Ferdinan Lengkong  
196612121991031001



Ditandatangani secara elektronik  
Rionald Silaban  
196604231990101001

